

PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN

EDUVOLUNTOURISM



NASKAH AKADEMIK

PARIWISATA EDUKASI
DAN KESUKARELAWANAN

EDUVOLUNTOURISM

APRIL 2021



Courtesy: Kampung Batik Laweyan

Pengantar

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luas pada kehidupan kepariwisataan nasional. Kecemasan atas kesehatan menyebabkan manusia mengurangi kegiatan perjalanan dan ini memberikan dampak besar pada menurunnya kinerja pariwisata nasional. Namun di sisi lain pandemi Covid-19 memberikan kesadaran baru pada cara mengelola pariwisata. Semangat membangun produk yang lebih berkualitas dalam konsep pariwisata berkualitas menjadi harapan baru untuk dapat segera memulihkan kehidupan kepariwisataan nasional. Konsep pariwisata yang berkualitas juga menjadi paradigma baru pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi pariwisata yang berkelanjutan.

Kini saat tepat untuk dapat segera mewujudkan amanat RPJMN 2020-2024. Pengembangan kegiatan pengetahuan, pendidikan, dan kesukarelawan tidak saja dengan tujuan untuk menjawab permintaan pasar namun juga untuk tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ukuran keberhasilan tidak lagi hanya menekankan jumlah kunjungan namun kualitas kunjungan sebagai hasil dari kualitas produk yang diciptakan.

Naskah akademik yang disusun ini merupakan konsep awal dari pemikiran besar atas pengembangan kegiatan tersebut. Masih ada serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan agar supaya gagasan ini dapat benar-benar di realisasi kan dengan baik. Keberhasilan program hanya dapat terwujud bila semua pihak dapat berkolaborasi untuk mendukung praktik pelaksanaan di lapangan.

Ucapan terima kasih sebesar besarnya kami sampaikan kepada BAPPENAS yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyusun naskah awal ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya naskah akademik ini. Semoga pemikiran awal ini dapat membantu tujuan pemulihan pembangunan pariwisata nasional dengan tetap dalam kerangka konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Jakarta, April 2021

Tim Penyusun

Henky Hermantoro
Ike Janita Dewi

Daftar Isi

Pengantar	v
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Kondisi Kepariwisata Nasional	1
2. Perubahan Lansekap Pariwisata	2
3. Konsep Pengembangan Kepariwisata	3
4. Pengembangan Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan	4
B. TUJUAN DAN SASARAN	5
C. MANFAAT	6
II. STUDI LITERATUR	7
A. KEBIJAKAN DAN PENGERTIAN UMUM	7
1. Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan dalam Kebijakan Nasional	7
2. Perubahan Arah Kebijakan Kepariwisata	9
3. Pengertian Umum	10
4. Tipologi Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan	12
B. DEFINISI DAN MANFAAT	14
1. Definisi Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan	14
2. Spektrum Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan	18
3. Dampak dan Manfaat Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan	19
C. PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN DALAM KONTEKS GLOBAL	24
1. Pariwisata Edukasi	24
2. Pariwisata Kesukarelawan	25
D. KEGIATAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN DI INDONESIA	26
1. Pariwisata Edukasi	26
2. Pariwisata Kesukarelawan	27

III. ANALISIS	30
A. PEMETAAN KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	30
1. Kerangka Regulasi	30
2. Kerangka Kelambagaan	33
B. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN	36
1. Pemangku Kepentingan	36
2. Pemetaan Pemangku Kepentingan Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan	36
C. PELUANG DAN TANTANGAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN	38
1. Pariwisata Edukasi	39
2. Pariwisata Kesukarelawan	40
D. SEGMENTASI PASAR DAN PENETAPAN SASARAN PASAR PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN	42
1. Pariwisata Edukasi	42
2. Pariwisata Kesukarelawan	44
IV. REKOMENDASI	
A. OPSI SKENARIO PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN	45
1. Pengembangan Produk Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan	45
2. Pengembangan Pemasaran	45
B. OPSI PEMBIAYAAN ATAU MODEL BISNIS PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN	46
1. Opsi Pembiayaan	46
2. Model Bisnis	46

C. KERANGKA REGULASI	47
1. Kerangka Regulasi	47
2. Kerangka Kelembagaan	49
D. KERANGKA RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN	49
V. PENUTUP	53
REFERENSI	54
CATATAN AKHIR	57



Courtesy: Sea Communities

A. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Kepariwisata Nasional

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019/awal tahun 2020 memberikan dampak luas bagi kehidupan manusia. Krisis kesehatan berpengaruh pada menurunnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan berlanjut pada terjadinya krisis kepercayaan dan kecemasan. Ini semua berakibat pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Prioritas diutamakan pada belanja kebutuhan pokok obat dan vitamin, serta pulsa dengan mengurangi belanja untuk makan di luar dan perjalanan (Simanungkalit, 2020)¹.

Hal ini menyebabkan pariwisata menjadi sektor yang terkena dampak negatif paling parah (*potential loser*) (Dcode)². Kecemasan akan risiko kesehatan telah menyebabkan manusia mengurangi kegiatan perjalanan. Tahun 2020 tercatat kunjungan wisman tahun 2020 sebanyak 4,0 juta turun banyak dari tahun 2019 sebanyak 16,1 juta (BPS, 2020a)³. Jumlah perjalanan wisnus juga turun dari sebanyak 282 juta (BPS, 2020b)⁴ diperkirakan menjadi sekitar 120-140 juta (Sungkari, 2020)⁵.

Penurunan kunjungan wisatawan ini berdampak besar pada industri pariwisata. Pada bulan Mei 2020 terjadi penutupan 2.000 hotel (Pudjiadi, 2020)⁶. Pada September 2020 di DKI tercatat sebanyak 200.000 pekerja di restoran di mal telah di rumah kan (Arifin, 2020)⁷. Biro dan agen perjalanan karena 90-95% dari mereka sudah menutup bisnis nya (Hutabarat, 2020)⁸. Angka-angka ini terus bertambah dengan belum dapat di atasi nya pandemi Covid-19 sampai akhir tahun 2020. Dampak ini belum termasuk pada dampak yang terjadi pada sektor-sektor lain terkait dengan pariwisata.

2. Perubahan Lansekap Pariwisata

Pandemi Covid-19 membawa perubahan pada pola konsumsi dan perilaku masyarakat. Riset Yuswohady (2020)⁹ menjelaskan perubahan perilaku konsumen, di mana masyarakat menjadi peduli sesama (*emphatic society*), mengarah pada menghindari kontak fisik, dan memilih interaksi melalui media digital (*go virtual*), lebih mementingkan kebutuhan dasar untuk makan dan kesehatan (*bottom of pyramid*), dan adaptasi baru berupa bekerja dan tinggal di rumah (*stay at home lifestyle*). Hal ini telah mengubah permintaan konsumen untuk lebih cenderung memilih kegiatan wisata yang menghindari kerumunan namun sekaligus dapat memberikan pengalaman (*experience*), pengetahuan (*knowledge*), dan kebutuhan akan kesehatan (*holistic healthy living*). Desa dan *remote area* kemudian menjadi pilihan tujuan wisata karena dapat memenuhi permintaan pasar tersebut (De Mey & De Ridder, 2020¹⁰; Yuswohady, 2020¹¹).

Di sisi lain terjadi pula perubahan sikap tuan rumah terhadap kondisi yang ada saat ini. Pandemi Covid-19 menyadarkan pentingnya perhatian untuk menjaga kehidupan destinasi. Pengalaman buruk akibat bentuk wisata massal ini menjadikan pilihan bentuk wisata ke depan lebih memberikan perhatian pula pada kehidupan destinasi. Ini merupakan isyarat positif dari pentingnya perubahan strategi pemasaran untuk lebih mendorong diwujudkannya keseimbangan strategi *market-product matching* dengan memperhatikan strategi berbasis pasar (*market-led* atau *market driven*) dengan strategi berbasis produk (*product-led* atau *market driving*).

3. Konsep Pengembangan Kepariwisata

Untuk menyikapi perubahan lansekap pariwisata tersebut, maka diperlukan cara-cara baru untuk merevitalisasi pariwisata. Ketika ceruk pasar semakin sempit dengan permintaan yang semakin spesifik serta kesadaran akan lingkungan yang lebih kuat dari tuan rumah, maka perlu diperkuat kesadaran untuk mendorong pentingnya konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*)¹² dan bertanggung jawab (*responsible tourism*)¹³ dengan berpedoman pada kode etik pariwisata global (UNWTO, 1999)¹⁴.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah *“Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities”* (UNWTO).

Pariwisata bertanggung jawab adalah *“...making better places for people to live in and better places for people to visit. Responsible Tourism requires that operators, hoteliers, governments, local people and tourists take responsibility, take action to make tourism more sustainable”* (Capetown Declaration)

Perubahan lansekap pariwisata tersebut menuntut perubahan kebijakan kepariwisataan nasional. Lama tinggal dan belanja menjadi lebih penting daripada jumlah. Kedua hal tersebut mencerminkan bentuk kualitas produk (*product value*) dalam konsep pembangunan pariwisata berkualitas (*quality tourism*) (Kosar & Kosar, nd; Foris, 2018)¹⁵.

Pariwisata berkualitas *“...should be approached as market category, which means that is a tourism product quality that makes the chain of tourism services”* (Kosar & Kosar)

4. Pengembangan Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawanan

RPJMN 2020-2024 (PerPres no.18 tahun 2002) menetapkan pilihan pengembangan bentuk kegiatan pariwisata edukasi dan kesukarelawanan (*pariwisata edukasi dan kesukarelawanan*) yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pengetahuan, pendidikan, dan kesukarelawanan. Kebijakan ini merupakan bentuk penajaman kebijakan (*reshaping*) atas praktik yang sama yang telah dilakukan sebelumnya guna memenuhi perubahan permintaan pasar.

Pilihan kebijakan ini akan mengubah kebijakan pembangunan pariwisata nasional dari konsep pertumbuhan jumlah kunjungan mengarah pada kualitas kunjungan. Tiga faktor utama yang memengaruhi konsep pariwisata berkualitas (*quality tourism*) ini adalah nilai lebih pengalaman yang didapat oleh wisatawan (*high value experience*), kualitas wisatawan (*high value market segment*), dan prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Berbeda dengan bentuk wisata umum (*general interest tourism*), pariwisata edukasi dan kesukarelawanan menuntut pengembangan produk wisata minat khusus (*special interest tourism*) bertitik berat pada keberlanjutan pembangunan. Produk pariwisata tidak lagi hanya terfokus pada upaya memenuhi kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*) namun juga komunitas (*community satisfaction*). Pilihan segmen pasar pun berubah tidak lagi bersifat umum namun khusus, sesuai dengan minat (*interest*), keahlian (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) wisatawan. Dengan demikian, pasar pariwisata edukasi dan kesukarelawanan tidak hanya berbasis pada geografis (*origins*) atau kebangsaan (*nationality*) namun lebih spesifik pada komunitas, dan ini akan memerlukan pendekatan baru dalam pengembangan promosinya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Pengembangan pariwisata edukasi dan sukarelawan ditujukan untuk dapat segera memulihkan kehidupan pariwisata nasional dalam konsep pembangunan pariwisata berkualitas. Beberapa tujuan pengembangan pariwisata edukasi dan sukarelawan adalah:

1. Mempromosikan bentuk pariwisata bertanggung jawab terhadap wisatawan, masyarakat, dan lingkungan;
2. Menyiapkan produk pariwisata berkualitas bagi wisatawan dengan tujuan untuk mendapat pengalaman (total experience), pengetahuan (knowledge), dan kehidupan yang lebih bermakna dengan berkembangnya masyarakat peduli pada sesama (emphatic society);
3. Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
4. Menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat; dan
5. Mendorong citra destinasi dan mempromosikan remote area untuk pemerataan distribusi kunjungan.

Sasaran pariwisata edukasi dan sukarelawan adalah:

1. Mendorong peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan melalui penciptaan produk berkualitas;
2. Sasaran wisatawan profesional, mahasiswa, pelajar, komunitas (individual), LSM; dan
3. Sasaran mitra pengembangan perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, lembaga sponsor, industri pariwisata, dan organisasi nirlaba.

C. MANFAAT

Manfaat studi pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan ini adalah:

1. Memberikan pengayaan pada produk pariwisata sesuai dengan permintaan pasar;
2. Menyiapkan produk pariwisata berbasis pada pengembangan konsep pariwisata berkualitas dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan;
3. Memberikan manfaat bersama baik bagi wisatawan maupun pada tuan rumah;
4. Memberikan masukan bagi rencana induk pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan
5. Memberikan masukan bagi penyusunan pedoman teknis untuk tindak lanjut bagi pelaksanaan di lapangan;
6. Masukan bagi kebijakan publik terkait dengan regulasi dan kelembagaan; dan
7. Meningkatkan pengenalan dan citra destinasi terutama bagi desa dan *remote area*.

II

STUDI LITERATUR

A. KEBIJAKAN DAN PENGERTIAN UMUM**1. Pengembangan Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan dalam Kebijakan Nasional**

Pembangunan kepariwisataan nasional bertujuan untuk pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, serta memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa (UU no.10 tahun 2009). Tujuan tersebut dicapai melalui pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. PP no. 50 tahun 2011 selanjutnya menjelaskan bahwa daya tarik wisata dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain wisata petualangan, wisata pendidikan, dan wisata kreatif.

Perpres no.18 tahun 2020 memberikan prioritas ada jenis produk wisata alam (wisata bahari dan petualangan), wisata budaya (wisata pusaka, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota, dan wisata desa), dan wisata buatan (MICE, *yacht and cruise*, wisata kebugaran, wisata kesehatan, dan wisata olahraga). Kebijakan lebih lanjut adalah pengembangan kegiatan pengetahuan, pendidikan, dan kesukarelawan (pariwisata edukasi dan kesukarelawan) yang lebih mengarah pada bentuk *serious leisure* (Williams, 2009)¹⁶.

Gambar 1.

Posisi pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan dalam Peraturan Perundangan



Sebagai sebuah produk wisata, pariwisata edukasi dan kesukarelawan merupakan bentuk kemasan barang, jasa, karakter destinasi dan kegiatan (UNWTO, 2008)¹⁷. Dengan demikian pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan harus didukung dengan kebijakan perkuatan regulasi dan kelembagaan guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya.

Produk pariwisata adalah “...a combination of different aspects (characteristics of the places visited, modes of transport, types of accomodation, specific activities at destination, etc.) around a specific center of interest such as nature tours, life on farms, visits to historical and cultural sites, visits to a particular city, the practice of specific sports, the beach, etc.” ... [it is] used by profesisonals in the tourism business to market specific packages or destinastion... such as culinary tourism, eco-tourism etc” (UNWTO, 2008).

2. Perubahan Arah Kebijakan Kepariwisata

Pandemik Covid-19 menyadarkan pentingnya memberikan perhatian pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Praktik masa lalu yang terlalu berorientasi pada mengejar jumlah kunjungan sering melupakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Dampak wisata massal tidak saja terjadi pada kerusakan lingkungan namun juga kerusakan ekonomi dan sosial masyarakat lokal.

Pembangunan kepariwisataan juga ditujukan untuk memberikan kepuasan pada para pihak yang terkait di dalamnya (*responsible tourism*). Pembangunan pariwisata bertanggung jawab tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*) namun juga tuan rumah (*community satisfaction industry*), industri, dan lingkungan (UNWTO, 1999)¹⁸.

Kebijakan masa lalu untuk mengejar pertumbuhan jumlah kunjungan telah memberikan pelajaran berharga bagi keberlanjutan pembangunan kepariwisataan. Besarnya jumlah kunjungan yang melebihi kapasitas daya dukung lingkungan bukannya memberikan manfaat namun persoalan pada kerusakan destinasi pariwisata. Pilihan ke depan adalah mengarah pada bentuk pariwisata berkualitas (*quality tourism*). Konsep pariwisata berkualitas ini akan memberikan penekanan pada pelaksanaan nilai produk pariwisata (*product value*) (Kosar & Kosar, nd; Foris, 2018)¹⁹.

Pilihan pada bentuk pariwisata berkualitas akan lebih memberikan perubahan fokus sasaran pembangunan kepariwisataan tidak lagi semata-mata pada jumlah namun lama tinggal dan besaran belanja wisatawan. Fokus pada upaya perpanjangan lama tinggal (*length of stay*) yang mencerminkan kepuasan pada produk pariwisata, dan besarnya belanja wisatawan yang mencerminkan kepuasan pada produk pendukung pariwisata.

Determinan dari pariwisata berkualitas terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok:

1. Produk harus dapat menghasilkan nilai pengalaman total (*high value experience*) bagi wisatawan;
2. Produk berkualitas akan mengarah pada pasar berkualitas (*high value market segments*) pula; dan
3. Semua kegiatan ini secara konsisten ditetapkan berbasis prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Gambar 2.

Determinan
Pariwisata
Berkualitas

Sumber:
Dewi dan Ginting,
2021²⁰



3. Pengertian Umum Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan

Pariwisata edukasi dan kesukarelawan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang (*leisure time*) untuk wisata (*travel*) dan rekreasi (*recreation*), sekaligus sebagai kegiatan untuk waktu kerja. Sebagai bagian dari waktu luang, maka pariwisata edukasi dan kesukarelawan bersifat sebagai bentuk kegiatan untuk wisata atau rekreasi lebih bersifat serius (*serious leisure*) bila perjalanan wisata dilakukan sekaligus mengisi waktu kerja atau sebaliknya (Williams, 2009)²¹.

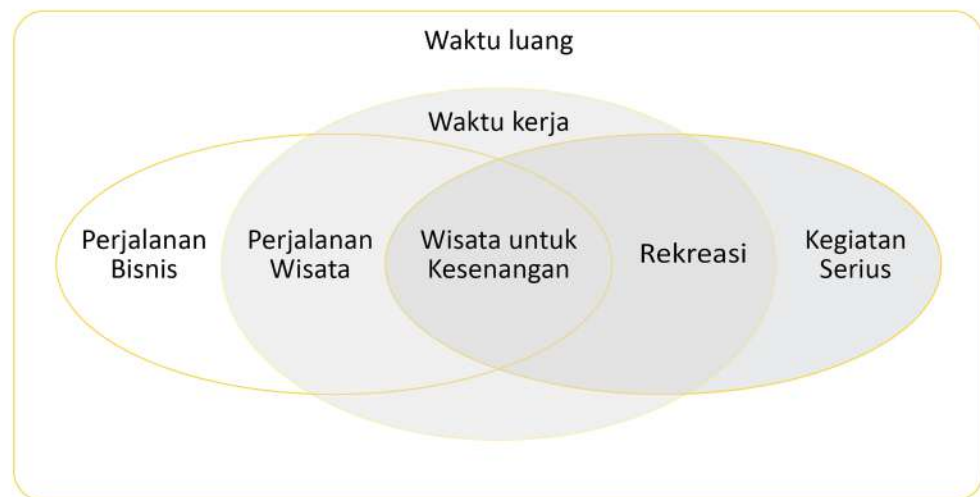
Tiga kesamaan ciri dari bentuk kegiatan-kegiatan di atas adalah:

1. Kesamaan motivasi dalam berpartisipasi dalam menikmati daya tarik wisata, mencari pengalaman, kontak sosial, dan eksplorasi;
2. Pendapatan, mobilitas, dan pengetahuan atas kesempatan yang ada;
3. Kesenangan, mobilitas, dan pengetahuan atau kenangan.

Gambar 3.

Hubungan Waktu Luang, Rekreasi, dan Wisata

Sumber:
Williams, 2019



Wisatawan edukasi dan sukarelawan adalah komunitas dengan minat, keahlian, dan pengetahuan terkait dengan tujuan tersebut. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dilakukan antara 24 jam sampai 12 bulan. Bagi mereka yang melakukan kegiatan kurang dari 24 jam disebut pelancong (*sameday traveler* atau *excursionist*), dan bagi mereka yang melakukan kegiatan lebih dari 12 bulan tidak lagi di kategorikan sebagai wisatawan (UNWTO, 2008²²; BPS, 2020²³).

Wisatawan adalah "...setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi..." (BPS, 2020).

Pengembangan pariwisata edukasi dan sukarelawan ditujukan untuk memberikan dampak pada usaha masyarakat yang berada di destinasi pariwisata. Untuk itu istilah yang digunakan, sesuai dengan UU no. 10 tahun 2009, adalah pariwisata edukasi dan sukarelawan dan bukan wisata edukasi dan sukarelawan.

Pariwisata edukasi dan kesukarelawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada tempat di luar kehidupan sehari-hari untuk tujuan belanja, penelitian dan/atau kesukarelawan sekaligus wisata dalam waktu sementara dengan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Tim, 2021).

4. Tipologi Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan

Tipologi pariwisata terkait dengan edukasi dan kesukarelawan dapat dibedakan atas pariwisata pengetahuan (*scientific*), akademik (*academic*), kesukarelawan (*volunteer*), dan edukasi (*education*) (Save Travel Alliance, 2020)²⁴ penjelasan masing-masing tipologi tersebut adalah:

1. Pariwisata pengetahuan memperkaya pengetahuan wisatawan dan memberikan dampak positif pada komunitas. Kegiatan diselenggarakan oleh institusi penelitian, universitas, LSM, dan organisasi kesehatan. Wisatawan mendapat manfaat dari interaksi dan praktik kesukarelawan pada pilihan lapangan jenis pengetahuan yang diminati;
2. Pariwisata akademik memberikan kesempatan pada mahasiswa/ pengajar/ peneliti untuk mendapatkan kredit akademik, sekaligus mendapatkan pengetahuan dari destinasi yang dikunjungi. Program ini dapat membantu profesor, peneliti, dan mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi sumber daya destinasi sesuai dengan minatnya;
3. Pariwisata edukasi memberikan kesempatan pada wisatawan untuk mempelajari bahasa, budaya lokal, dan kegiatan lainnya; dan
4. Pariwisata kesukarelawan memberi kesempatan pada wisatawan untuk mendukung proyek dan bantuan pada komunitas lokal. Kegiatannya dapat berupa mengajar bahasa, perbaikan lingkungan kesehatan, dan pelestarian pusaka (heritage).

RPJMN 2020-2024 mengelompokkan tipologi tersebut kedalam tiga bentuk kegiatan berupa pengetahuan, pendidikan, dan kesukarelawan. Tipologi yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut kemudian dapat dibedakan atas dua kelompok utama yaitu edukasi, termasuk pengetahuan dan pendidikan, dan kesukarelawan.

Tabel 1.

Tipologi
Pariwisata
Edukasi dan
Kesukarelawan

Sumber:
Tim, 2021

Tipologi	Target Pasar		Kegiatan
Edukasi (<i>edutourism</i>)	Pengetahuan	Wisatawan dengan minat sains	Kegiatan penelitian dsb
	Pendidikan	Dosen, peneliti, mahasiswa/pelajar, wisatawan dengan minat belajar di destinasi lain baik di dalam maupun luar negeri	Pertukaran mahasiswa/ pelajar untuk kepentingan tesis, pertukaran dosen/ peneliti, study tour, reuni, mempelajari bahasa, mempelajari budaya/ industri kreatif dan pengalaman unik lainnya
Kesukarelawan (<i>voluntourism</i>)	Kesukarelawan	Wisatawan dengan minat membantu komunitas dan lingkungan	Pembangunan sarana kesehatan, kepedulian pada lingkungan dsb

B. DEFINISI DAN MANFAAT

1. Definisi Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan

Definisi pariwisata edukasi dan kesukarelawan dapat lebih spesifik dibagi atas 2 (dua) kelompok yaitu pariwisata edukasi dan pariwisata kesukarelawan karena perbedaan minat, tujuan, dan kegiatannya.

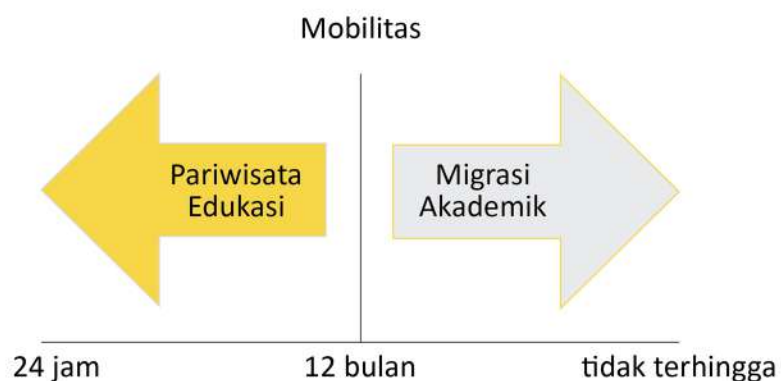
a. Definisi Pariwisata Edukasi

Kegiatan akademi dapat dilakukan di luar kampus (*academic mobility*) yang dibedakan atas pengertian migrasi akademi (*academic migration*) dan pariwisata edukasi (*educational tourism*). pariwisata edukasi (*edutourism*) atau pariwisata akademik memerlukan waktu antara 24 jam sampai 12 bulan tahun untuk tujuan mendapatkan gelar atau mengikuti kursus singkat (Maga & Nicolau, 2018²⁵; Xosé, 2013²⁶). Berbeda dengan pariwisata edukasi, migrasi akademik misalnya mengambil gelar kesarjana, akan memerlukan waktu lebih dari 12 bulan dan pelakunya tidak masuk dalam kategori sebagai wisatawan.

Gambar 4.

Mobilitas Akademik

Sumber:
Maga & Nicolau,
2018



Pengertian pariwisata edukasi memiliki spektrum yang luas terkait dengan pendidikan, perjalanan, dan keahlian (Tomasi, 2020)²⁷. Wisatawan edukasi adalah mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan berkenaan dengan edukasi untuk mempelajari keahlian baru atau mengembangkan keahlian yang sudah ada bersamaan dengan kegiatan wisata (Gibson, 1998)²⁸, atau kegiatan perjalanan terorganisasi yang diatur oleh agen perjalanan di mana kegiatan wisata dan edukasi dilakukan secara bersamaan (Sie, et al, 2016)²⁹.

Dalam praktik, pariwisata edukasi memiliki rentang kontinum (*continuum ranging*) dari bentuk kegiatan belajar ketika melakukan perjalanan (*general interest learning while traveling*) atau sengaja bertujuan untuk belajar dan melakukan perjalanan (*purpose learning and traveling*) (Ritchie, 2003)²⁸. Sebagai sebuah kegiatan perjalanan wisata maka kegiatan yang dilakukan tetap dengan menggunakan mengonsumsi atraksi dan fasilitas yang ada di destinasi.

Gambar 5.

Rentang
Kontinum
Pariwisata Edukasi

Sumber:
Ritchie, 2003



Dalam pariwisata edukasi dikembangkan pula kegiatan wisata pengetahuan (*scientific tourism*) yang di asosiasi kan sebagai perjalanan bagi profesional untuk menjalankan praktik profesionalisme dalam bentuk kegiatan terkait dengan bisnis, ekonomi, sosial. Kegiatan tidak hanya dengan tujuan praktik pengetahuan namun juga wisata, atau sebaliknya (Kosiewics, nd)²⁹. Bentuk kegiatan ini akan dapat memberikan pengalaman pribadi di samping memberikan manfaat pada tuan rumah (Goabroad, 2020)³².

Dengan pemahaman-pemahaman di atas maka definisi pariwisata edukasi yang dibangun oleh Tim adalah:

Pariwisata edukasi adalah perjalanan yang dilakukan oleh individu/kelompok ke luar tempat tinggal sehari-hari dengan motivasi utama belajar dan penelitian bersamaan dengan kegiatan wisata dalam durasi antara 24 jam sampai dengan maksimal 12 bulan (Tim, 2021).

b. Definisi Pariwisata Kesukarelawanan

Pariwisata kesukarelawanan ini merupakan contoh dari bentuk pariwisata alternatif dengan mengutamakan praktik pariwisata berkelanjutan. Ia mengubah pemikiran arus utama dari pariwisata untuk tujuan ekonomi menjadi sebuah kegiatan yang meningkatkan nilai sosial, budaya, ekologi pada lingkungan lokal dan komunitas (Lyons & Wearing, 2008)³³.

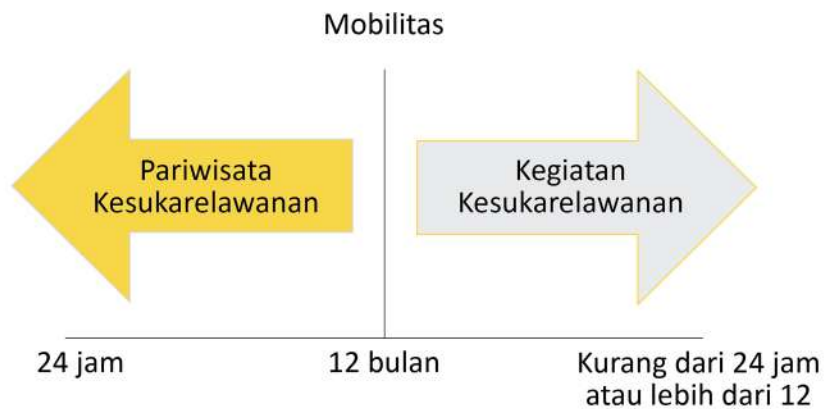
Pariwisata kesukarelawanan juga memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan bersamaan dengan mengeksplorasi sumber daya yang ada di destinasi yang dikunjungi. Perjalanan kesukarelawanan tidak hanya memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitas lokal namun juga bagi pelakunya (Goabroad, 2020)³⁴.

Pariwisata kesukarelawanan mencakup kunjungan ke suatu destinasi dengan motivasi utama untuk melakukan kegiatan kesukarelawanan yang dilakukan dalam jangka waktu antara 24 jam sampai dengan 12 bulan. Aktivitas dalam pariwisata kesukarelawanan meliputi: aktivitas kegiatan kemanusiaan (*humanitarian voluntourism*), konservasi, pengajaran (*teaching*), pengembangan komunitas (*community development*), dan pembangunan sarana fisik (*construction*). Dalam praktik, kegiatan kesukarelawanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti perbaikan sanitasi, perpustakaan, kesehatan dsb (Benita, 2020)³⁵. Mobilitas kesukarelawanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6.

Mobilitas
Kesukarelawananan

Sumber:
Benita, 2020



Dalam praktik pariwisata kesukarelawananan juga memiliki rentang kontinum (*continuum ranging*) dari bentuk kegiatan kesukarelawananan ketika melakukan perjalanan atau sengaja bertujuan untuk melakukan perjalanan sekaligus melakukan kegiatan kesukarelawananan. Sebagai sebuah kegiatan perjalanan wisata maka kegiatan yang dilakukan tetap dengan menggunakan mengkonsumsi atraksi dan fasilitas yang ada di destinasi.

Gambar 7.

Rentang
Kontinum
Pariwisata
Kesukarelawananan



Dengan pemahaman-pemahaman di atas maka definisi pariwisata kesukarelawananan yang dibangun oleh Tim adalah:

Pariwisata kesukarelawananan adalah perjalanan yang dilakukan oleh individu/kelompok ke luar tempat tinggal sehari-hari dengan motivasi utama melakukan kegiatan kesukarelawananan bersamaan dengan kegiatan wisata dalam durasi antara 24 jam sampai dengan maksimal 12 bulan (Tim, 2021).

2. Spektrum Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan

a. Pariwisata Edukasi

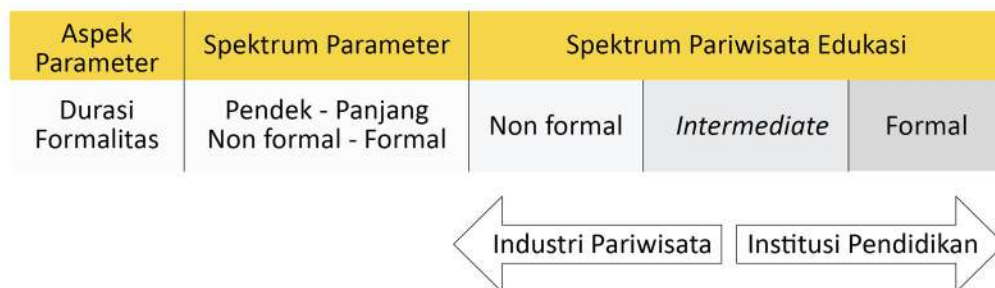
Berdasarkan berbagai kajian tentang pariwisata edukasi di banyak negara, maka spektrum pariwisata edukasi bisa dipetakan menggunakan parameter durasi dan formalitas. Berdasarkan dua parameter tersebut, spektrum pariwisata edukasi meliputi spektrum non-formal - *intermediate* - formal.

Spektrum tersebut juga berimplikasi pada keterlibatan 2 (dua) kategori pemangku kepentingan, yaitu institusi pendidikan (ke arah pariwisata edukasi formal) dan industri pariwisata (untuk pariwisata edukasi yang non-formal). Industri pariwisata lebih berperan dalam pengembangan spektrum pariwisata edukasi bersifat non formal. Di sisi lain, institusi pendidikan lebih berperan dalam spektrum pariwisata edukasi formal. Akan tetapi, kolaborasi peran pemangku kepentingan tersebut perlu didorong untuk memperluas dan menambah dampak ekonomi dari pariwisata edukasi.

Gambar 8.

Spektrum
Pariwisata Edukasi

Sumber:
Tim, 2021
(disarikan dari
berbagai sumber)



b. Pariwisata Kesukarelawan

Berdasarkan berbagai kajian literatur, pariwisata kesukarelawan dapat didefinisikan dengan didasarkan pada lima aspek (parameter), yaitu karakteristik destinasi, durasi proyek, fokus pengalaman yang dicari, intensitas partisipasi, kualifikasi partisipan, dan kontribusi pada masyarakat lokal. Berdasarkan pada aspek-aspek tersebut, spektrum pariwisata kesukarelawan bisa merentang dari *shallow* - *intermediate* - *deep*.

Spektrum jenis pariwisata kesukarelawan juga memberikan implikasi pada pemangku kepentingan yang terlibat. pariwisata kesukarelawan yang *'deep'* lebih melibatkan LSM, sementara yang bersifat *'shallow'* bisa melibatkan industri pariwisata secara lebih intensif. Identifikasi peran utama dari pemangku kepentingan dalam spektrum pariwisata kesukarelawan ini memperluas identifikasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kepariwisataan dan mendorong kerja sama/ kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut dengan lebih intensif.

Aspek Parameter	Spektrum Parameter	Spektrum Pariwisata Edukasi		
Destinasi Durasi proyek Fokus pengalaman yang dicari Partisipasi Kualifikasi partisipan	Tertinggal - Maju Pendek - Panjang <i>Self interest</i> - Altruism Pasif - Aktif Rendah - Tinggi Rendah - Tinggi	<i>Shallow</i>	<i>Intermediate</i>	<i>Deep</i>

Gambar 9.

Spektrum Pariwisata Kesukarelawan



Sumber: Tim, 2021 (disarikan dari berbagai sumber)

3. Dampak dan Manfaat Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan

a. Dampak Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan

Pariwisata edukasi dan kesukarelawan memberikan dampak luas bagi pembangunan kepariwisataan. Dampak ekonomi yang terjadi adalah:

- Belanja langsung wisatawan untuk transportasi lokal, makan minum, akomodasi, material program, uang kuliah dll. Termasuk belanja langsung untuk produk usaha dan jasa pariwisata seperti pembelian cenderamata, jasa pramuwisata dll.;
- Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) berupa pasokan bahan baku/bahan penolong produk sektoral, usaha dan jasa pariwisata misalnya produk pertanian, makanan/minuman olahan, material program dll.; dan

- Keterkaitan ke depan (*forward linkage*) berupa pendapatan yang diterima oleh institusi/perusahaan/masyarakat berupa gaji, pendapatan langsung atas jasa yang diberikan dll. yang selanjutnya akan dibelanjakan untuk produk yang disediakan oleh penyedia jasa lainnya.

Gambar 10.

Dampak Ekonomi
Pariwisata Edukasi
dan Kesukarelawan

Sumber: Tim, 2021



Dampak lain dari pariwisata edukasi dan kesukarelawan, dan dapat dipertimbangkan untuk dimonetasi, adalah:

- Peningkatan pengaruhnya pada pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat setara atau lebih besar, bahkan lebih efektif dan efisien, daripada anggaran pelatihan yang dilakukan oleh institusi publik;
- Pengembangan spirit kewirausahaan dan kapasitas sumber daya masyarakat;
- Peningkatan *branding* destinasi yang setara dengan anggaran komunikasi pemasaran bahkan lebih spesifik pada tema dan lokasi;
- Memberikan peluang pada pengembangan desa dan remote area untuk berkembang dan dipromosikan; dan
- Eksternalitas positif pada lingkungan dan sosial budaya (setara dengan penyelamatan lingkungan dan sosial budaya jika wisatawan tidak termasuk golongan wisatawan bertanggung jawab).

b. Manfaat Pengembangan Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawanan

Pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawanan akan memberikan manfaat luas bagi pengembangan kepariwisataan nasional. Dengan kekayaan sumber daya nasional yang dimiliki maka produk ini diharapkan dapat segera memulihkan pariwisata karena sesuai dengan permintaan pasar wisatawan baru dengan berbasis pada pembangunan pariwisata berkualitas. Beberapa manfaat dari pariwisata edukasi dan kesukarelawanan ini adalah:

- Pemanfaatan fasilitas pariwisata yang menganggur (*idle*) akibat pandemi Covid-19;
- Berlangsungnya kegiatan pariwisata di desa dan daerah terpencil (*remote area*);
- Terbangunnya spirit kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta peningkatan pengetahuan dan kepedulian pada lingkungan;
- Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- Peningkatan nilai tambah (*added value*) sumber daya lokal guna meminimalkan terjadinya kebocoran ekonomi (*economy leakages*);
- Penciptaan nilai produk (*value creation*) untuk tujuan pembangunan pariwisata berkualitas (*quality tourism*);
- Penciptaan produk pariwisata yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan bersama antara wisatawan (*tourist satisfaction*), masyarakat lokal (*community satisfaction*) serta lingkungan (*environment satisfaction*); dan
- Pengenalan dan penciptaan citra destinasi pariwisata dalam skala internasional dan nasional.

c. Manfaat Pariwisata Edukasi

Pariwisata edukasi membangun kebutuhan untuk pembelajaran praktis sekaligus mencari pengalaman di luar kehidupan sehari-hari. Di sini pembelajaran atas dasar pengalaman (*experiential learning*) merupakan bagian dari pendidikan keluar dari lingkungan dan pariwisata merupakan bagian dari pengalaman total. Pelajar/mahasiswa akan menerima manfaat tidak hanya dalam bentuk pembelajaran namun juga interaksi dengan komunitas lokal yang akan pengembangan profesionalitas mereka.

Di sisi lain masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pemanfaatan fasilitas akomodasi, makan minum, hiburan dsb. (Tomasi, 2020)³⁶. Rincian manfaat pariwisata edukasi bagi wisatawan dalam beberapa hal, yaitu (Atlantis, 2018)³⁷:

- Pembelajaran efektif. Mengikuti pembelajaran di kelas lebih bertitik berat pada situasi hipotetikal sedangkan pembelajaran di luar ruang kelas dapat memahami kondisi riil yang ada dan memecahkan masalah spesifik. Bagi para partisipan, belajar sambil wisata akan juga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan;
- Pertukaran gagasan. Kegiatan luar kelas akan memberikan diskusi yang lebih hidup tidak terbatas dengan kolega namun juga dengan masyarakat. Para partisipan juga dapat mengunjungi sumber daya yang menjadi topik studinya;
- Pengembangan pribadi. Belajar di luar lingkungan sehari-hari akan membangun kemandirian, keahlian kepemimpinan, dan keahlian komunikasi. Demikian pula berbagi nilai budaya dengan masyarakat lokal yang semuanya akan membangun kemandirian dan kepribadian yang kuat bagi wisatawan;
- Memperluas perspektif. Melakukan kegiatan di luar lokasi kehidupan sehari-hari akan memperluas cakrawala pengetahuan wisatawan. Mereka akan dapat memahami isu riil yang ada di destinasi dan berakibat pada meningkatnya empati dan respek pada kehidupan budaya masyarakat lain; dan
- Membangun jejaring global. Keluar dari lingkungan keseharian akan menyebabkan terjadinya interaksi yang lebih luas dengan masyarakat yang berbeda-beda. Ini akan membangun toleransi atas perbedaan yang ada.

Di sisi lain, pariwisata edukasi juga akan memberi manfaat pada tuan rumah dalam beberapa hal, yaitu (Sharma, 2015)³⁸:

- Transfer ilmu pengetahuan;
- Mendorong tumbuhnya investasi;
- Peluang lapangan (usaha dan) kerja;
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat (dan pendapatan daerah);
- Pembangunan infrastruktur;
- Ketersediaan tenaga kerja ahli;
- Pertukaran budaya (dan transfer pengetahuan);

- Terbentuknya pusat unggulan pariwisata di daerah;
- Meningkatkan kapasitas pengambilan risiko dan kewirausahaan;
- Kolaborasi internasional;
- Pengenalan pelatihan baru di lokasi;
- Eksplorasi tempat yang masih belum dikenal (dan peningkatan nilai sumber daya lokal);
- Globalisasi destinasi; dan
- Membangun citra destinasi.

d. Manfaat Pariwisata Kesukarelawan

Berbeda dengan pariwisata edukasi, wisata kesukarelawan masih membuka peluang pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang pro, argumentasi mereka adalah bahwa pariwisata kesukarelawan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, demikian pula dapat memberikan pendapatan yang baik bagi komunitas. Bagi yang kontra, perilaku yang buruk dari sukarelawan dapat memberikan dampak negatif pada komunitas. Demikian pula kegiatan ini dapat menyebabkan komunitas tergantung pada pertolongan pihak luar (Sowards, 2018)³⁹.

Namun bila dikelola dengan baik pariwisata kesukarelawan pun dapat memberikan manfaat bagi wisatawan maupun komunitas (Goabroad, 2020)⁴⁰. Syaratnya adalah bahwa sukarelawan memiliki latar belakang keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan isu yang ditanganinya. Manfaat pariwisata kesukarelawan bagi wisatawan adalah :

- Memberikan kesempatan untuk mengenali destinasi lebih dekat;
- Memberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian;
- Menjaga kecerdasan emosional (*emotional intelligence*); dan
- Meningkatkan karir.

Di sisi lain, pariwisata kesukarelawan juga akan memberi manfaat pada tuan rumah dalam beberapa hal, yaitu:

- Memberikan harapan dan kebahagiaan pada tuan rumah;
- Menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan;
- Membangun koneksi komunitas global.

C. PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN DALAM KONTEKS GLOBAL

1. Pariwisata Edukasi

Sebagian besar data tersedia lebih memberikan perhatian pada pergerakan pelajar/mahasiswa yang melakukan kegiatan studi di luar negeri. Mereka diperkirakan berkontribusi sebesar 20% dari wisatawan internasional (Attaalla, 2020)⁴¹. Belanja pelajar/mahasiswa ini diperkirakan mencapai USD 320 milyar dengan 40% nya berupa perjalanan wisata edukasi (Custer,2013)⁴². Pariwisata edukasi berkembang pesat terutama di beberapa negara maju. Transaksi pariwisata edukasi di Kanada meningkat dari CAD 2.733 juta tahun 2005 menjadi CAD 13.768 juta (Statista.com)⁴³. Hal yang sama terjadi di beberapa negara lain dan ini mendorong tumbuhnya usaha perjalanan yang mengelola pariwisata edukasi, misalnya Exodus Travel, Intrepid, Topdeck, dan Bright Spark (Attaalla, 2020)⁴⁴.

Kajian tentang pariwisata edukasi di banyak negara mencakup aktivitas pariwisata edukasi dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan institusi penelitian, universitas, LSM, atau organisasi profesi, industri pariwisata, melaksanakan kegiatan di destinasi yang membutuhkan pengetahuan dan bantuan keterampilan tertentu;
- Program pertukaran pelajar/mahasiswa, penelitian untuk kepentingan tesis, pertukaran dosen/peneliti, kunjungan studi jangka pendek (study tour);
- Reuni, mempelajari bahasa asing, kursus memasak, belajar budaya/ kerajinan lokal, atau pengalaman unik lainnya.
- Melakukan kegiatan wisata lain seperti kunjungan pada daya tarik dan mengikuti tur di destinasi; dan
- Memanfaatkan fasilitas pariwisata dan umum selama melakukan kegiatannya.

2. Pariwisata Kesukarelawanan

Pariwisata kesukarelawanan menjadi tren baru dalam perkembangan pariwisata dunia. Setiap tahun diperkirakan sebanyak 1,6 juta sukarelawan tersebar di luar negeri (Save the Children Organization, 2017)⁴⁵. Beberapa catatan kegiatan pariwisata kesukarelawanan dalam skala global adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2004, ada 800 organisasi yang menawarkan aktivitas kesukarelawanan di 200 negara;
- Pada tahun 2006, besaran pariwisata kesukarelawanan diperkirakan sebesar USD150 juta;
- Pada tahun 2008, survei dari Tourism and Research Marketing atas 300 organisasi memperkirakan besaran pasar sebesar 1,6 juta wisatawan kesukarelawanan per tahun, dengan nilai £1.3 miliar;
- Pada tahun 2008, pasar pariwisata kesukarelawanan diperkirakan tumbuh 5-10% di Eropa Barat dalam kurun waktu lima tahun;
- Pada tahun 2009, survei GeckoGo atas lebih dari 2000 wisatawan kesukarelawanan menemukan bahwa UK adalah asal wisatawan kesukarelawanan terbesar ke-3 di dunia; Untuk tahun 2010 dan seterusnya, diperkirakan besaran pariwisata kesukarelawanan global adalah USD 25 - 30 juta, dimana pasar Amerika Serikat akan berkontribusi pada 1 juta wisatawan per tahun sejak 2007 dan besarnya akan bisa mencapai 10 sd 15 juta;
- Pada tahun 2012, 35% responden dewasa menyatakan bahwa mereka akan ingin berwisata yang melibatkan komponen pariwisata kesukarelawanan. Angka tersebut adalah tambahan di atas 6% responden yang sudah pernah terlibat dalam pariwisata kesukarelawanan;
- Pada Tahun 2015, Nancy Gard McGehee (Virginia Tech) memperkirakan 10 juta relawan setiap tahun dengan pembelanjaan sampai pada USD 2 milyar.

D. KEGIATAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN DI INDONESIA

1. Pariwisata Edukasi

Praktik kegiatan pariwisata edukasi sudah banyak dilakukan di Indonesia hanya belum secara spesifik dilakukan pencatatan sehingga tidak ditemui data untuk ini. Wisatawan edukasi telah berkembang dalam bentuk pergerakan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Paket wisata edukasi telah menjadi wisata minat khusus yang dirancang dan dijual oleh industri wisata, misalnya:

- Dalam kemasan wisata kreatif seperti yang dilakukan di Laweyan (Solo), Kasongan (Jogja), dan Mang Udjo (Bandung) (Hermantoro, 2014)⁴⁶;
- Paket wisata edukasi dalam bentuk kunjungan ke museum, institusi pendidikan, atau paket ke desa wisata;
- Paket wisata agro seperti yang dilakukan di Boyolali (perah susu sapi), dan beberapa desa wisata lainnya; dan
- Praktik penelitian kawasan dan bangunan pusaka di Imogiri; Paket pariwisata edukasi yang telah dilakukan oleh industri pariwisata secara rutin bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dilakukan oleh Panorama.

Paket wisata edukasi juga berkembang melalui mobilitas akademik atau sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, misalnya:

- Kegiatan pelajar/mahasiswa berkunjung ke lokasi tertentu untuk pembelajaran sekaligus wisata seperti program kuliah lapangan mahasiswa Geologi ke Karang Sambung, Kebumen, Bali, dan Imogiri Yogyakarta;
- Kegiatan mahasiswa dalam bentuk pengabdian pada masyarakat, misalnya: kegiatan pendampingan desa wisata seperti yang dilakukan oleh STP Trisakti di Jawa Barat;
- Penelitian yang dilakukan oleh peneliti/ akademisi asing di berbagai wilayah di Indonesia; dan

- Kegiatan pengabdian masyarakat internasional (*service learning program*) yang melibatkan mahasiswa asing untuk melaksanakan kegiatan KKN, seperti yang dilaksanakan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam kerjasama dengan International Association of Jesuit Business Schools.

Gambar 11.

Praktik Pariwisata
Edukasi

Courtesy:
Kampung Batik
Laweyan



Gambar di atas menunjukkan contoh pengembangan pariwisata edukasi yang disiapkan oleh komunitas pembatik Laweyan, Surakarta. Wisatawan dapat belajar membatik sekaligus menginap di homestay, mengonsumsi makan minum, tur kampung pusaka, dsb.

2. Pariwisata Kesukarelawanan

Praktik pariwisata kesukarelawanan juga telah banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa organisasi kemasyarakatan banyak melakukan kegiatan kesukarelawanan untuk membantu masyarakat. Proyek atau aktivitas paling populer dalam wisata kesukarelawanan adalah; kegiatan kemanusiaan (62%), konservasi (56%), pengajaran (56%), pengembangan komunitas (53%), dan konstruksi (28%)⁴⁷.

Pariwisata kesukarelawan ini banyak bergerak di desa dan *remote areas* sehingga memberikan manfaat langsung pada masyarakat miskin. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- Bantuan pembangunan sarana kesehatan, perpustakaan, dan kesehatan yang dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Rotary Club; dan
- Paket wisata yang memasukkan kegiatan kesukarelawan yang disiapkan oleh industri pariwisata seperti menanam hutan bakau dan melepas tukik di Bali, pendidikan, dan bantuan peralatan belajar bagi komunitas lokal.

Institusi dan program wisata kesukarelawan di Indonesia yang ditawarkan oleh berbagai institusi/ lembaga di Indonesia (dalam kerja sama dengan lembaga internasional)⁴⁸ adalah:

- Sea Communities (Bali, isu: penanaman terumbu karang, mengajar bahasa dsb);
- Batu Kapal Conservation (Bukit Lawang; Gunung Leuser National Park);
- North Bali Reef Conservation (Amlapura, Bali);
- Gili Shark Conservation (Lombok);
- Samboja Lestari Orangutan Sanctuary (Balikpapan);
- Involvement Volunteer IVI (isu/ proyek: edukasi nutrisi dan pendidikan di Ubud);
- Childcare Companion (Tabanan);
- EcoFarm (Bukit Lawang);
- Bali Dyslexia Foundation (isu/ proyek: coral reef restoration (Buleleng) dan pengajaran Bahasa Inggris di Singaraja);
- Fronteering Travel (Medan);
- Jamsoo Trainee (isu: pengajaran Bahasa Inggris di Seraya, Bali);
- Fuze Ecoteer (Wildlife Rescue Centre, Yogyakarta);
- AFS Indonesia (isu/proyek: membantu petani rempah-rempah dan pengajaran di Ende; edukasi kesehatan di Jakarta, pemberdayaan masyarakat di Makasar dan Lumajang);
- Batu Kapal Conservation (Bukit Lawang; Gunung Leuser National Park);
- North Bali Reef Conservation (Amlapura, Bali);
- Gili Shark Conservation (Lombok);

Gambar 12.

Praktik Pariwisata
Kesukarelawanan

Courtesy: Sea
Communities, 2020



Gambar di atas merupakan contoh pariwisata kesukarelawan di Bali yang disiapkan oleh Sea Communities di mana wisatawan melakukan kegiatan wisata bahari sekaligus melakukan penanaman koral untuk pelestarian lingkungan.

III

ANALISIS

A. PEMETAAN KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

1. Kerangka Regulasi

Regulasi diciptakan untuk tujuan memberi kemudahan bagi pelaksanaan rencana kegiatan dengan beberapa catatan, yaitu:

- Memberikan kemudahan bagi wisatawan dan mitra;
- Menjamin ketahanan nasional;
- Memperluas dampak positif dan meminimalisir dampak negatif;
- Mendorong inisiatif dan kreativitas masyarakat dan mitra;
- Manfaat bagi kelengkapan kebijakan publik;
- Mendorong penemuan baru di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya; dan
- Memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal.

a. Bidang Kepariwisata

- Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Km.18/Hm.001/Mkp/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;

- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran;
- Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata; dan
- Global Code of Ethics UNWTO 1999.

b. Bidang Kesehatan

- Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/ Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
- Pedoman Protokol Kesehatan Kemenparekraf untuk Hotel dan Restoran.

c. Bidang Keimigrasian

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Kemenkumhan Nomor 3 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjunganm serta Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban memiliki Izin Tinggal;
- Peraturan Kemenkumhan Nomor 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan; dan
- Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

d. Bidang Riset

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; dan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

e. Bidang Pendidikan

- Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.

Identifikasi Masalah :

- Pedoman umum dikeluarkan oleh berbagai lembaga dan ini berpotensi tumpang tindih regulasi yang akan menyulitkan pelaksanaan di lapangan;
- Regulasi belum mengatur ketentuan kegiatan individu atau grup termasuk persyaratan bagi pelaku usaha yang mengatur kunjungan dalam bentuk grup;
- Permintaan perizinan tidak spesifik menjelaskan tujuan untuk edukasi dan sukarelawan sehingga akan menyulitkan pengumpulan data statistik sebagai landasan kebijakan;
- Belum disiapkan regulasi yang dapat memberi insentif agar kebijakan ini dapat berlangsung dengan baik tanpa mengurangi faktor kehati-hatian;
- Konflik regulasi tidak hanya terjadi di tingkat nasional namun juga antara Pusat dan Daerah. Demikian pula antar Daerah padahal kegiatan wisata memiliki sifat kegiatan lintas batas (borderless);
- Konflik juga terjadi antara regulator dengan masyarakat terkait dengan pemanfaatan sumber daya wisata; dan
- Konflik terjadi antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pengusaha lokal.

Rumitnya Regulasi, Hambatan Bagi Sektor Pariwisata Indonesia

Johanes Randy Prakoso

detikTravel tgl. 12 Juli 2017

Pembangunan sektor pariwisata Indonesia memiliki banyak tantangan. Untuk Indonesia, salah satu masalahnya terletak pada rumitnya regulasi atau aturan.

Sebelum traveler atau investor masuk ke Indonesia, ada dinding bernama regulasi atau perizinan yang harus dilalui lebih dulu. Diungkapkan oleh Menpar Arief Yahya saat press conference Nihl Sumba Island di Gedung Sapta Pesona, Rabu (12/7/2017), hal itu menjadi masalah utama untuk memajukan pariwisata Indonesia.

"Saya harus berterus terang, perizinan di kita sangat susah. Untuk merubah mental kita itu perlu waktu 10-20 tahun. Segala sesuatu yang terkait permit kita nilainya pasti jelek. Begitu ada izin pasti jelek. itu membuat image kita di depan investor tidak terlalu bagus," ujar Arief.

2. Kerangka Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan merupakan cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Konsep efektivitas menjelaskan seberapa baik organisasi dapat berjalan dibandingkan dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan. Konsep efisiensi lebih ditujukan untuk melihat cara pendayagunaan sumber daya yang tersedia digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Israel, 1990)⁴⁹.

Pendekatan pengembangan kelembagaan tersebut dapat berupa pendekatan normatif, anggota lembaga bekerja menurut norma yang telah ditetapkan, atau responsif, yaitu adanya pilihan untuk merespon perkembangan. Ada 4 (empat) dimensi yang digunakan dalam menetapkan fungsi kelembagaan (Huntington, 1968)⁵⁰ yaitu: kewenangan (*autonomy*), kemampuan beradaptasi (*adaptability*), kompleksitas (*complexity*) dan koheren (*coherent*).

Pengembangan kelembagaan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Efisiensi dan efektivitas lembaga;
- Debirokratisasi;
- Rentang kendali (*span of control*) koordinasi dan pengawasan;
- Desain struktur sesuai dengan fungsi utama organisasi;
- Kolaborasi antar lembaga (meniadakan tumpang tindih urusan);
- Miskin struktur kaya fungsi.

a. Tugas dan Fungsi Lembaga

UU nomor 23 tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan. Urusan Pusat (urusan absolut) mencakup bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pariwisata merupakan urusan konkuren, yang merupakan urusan bersama antara Pusat dengan Daerah. Kewenangan Pusat lebih pada penetapan perencanaan tingkat nasional, pedoman, dan sertifikasi, sedangkan Daerah berwenang untuk mengatur teknis pelaksanaan. Bidang-bidang dalam UU nomor 23 tahun 2014 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam struktur organisasi serta tugas dan fungsi kementerian/lembaga melalui Peraturan Presiden. Tugas dan fungsi inilah yang kemudian menjadi landasan operasional bagi kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

b. Identifikasi masalah

- Struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait tidak dijabarkan secara rinci atas urusan terkait dengan pengembangan kepariwisataan (UU no.23 tahun 2014 dan UU no. 10 tahun 2009). Akibatnya masing-masing kementerian memberikan interpretasi sendiri atas pembangunan pariwisata di dalam sektor yang menjadi urusannya;
- Karena pendekatan bersifat normatif maka ukuran kinerja bukan kolektif namun sektoral, padahal keluaran pembangunan kepariwisataan bersifat kolektif; Masih kuatnya ego sektoral yang mempersulit koordinasi lembaga di tingkat Pusat bahkan antara Pusat dengan Daerah;
- Duplikasi dan inkonsistensi pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan memerlukan konsistensi kebijakan, dan ini sering tidak dilakukan pada setiap perubahan pimpinan organisasi; dan

- Sering terjadi ketidaksamaan persepsi dalam pembangunan kepariwisataan antara Pusat dengan Daerah. Sebagai urusan pilihan maka Daerah sering tidak memberikan prioritas bagi pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Tugu Nama di Gunung Bromo Diprotes, Apa Jawaban Pengelola TNBTS?

Kompas.com - 14/10/2017, 17:42 WIB. Kontributor Malang, Andi Hartik

Pembangunan tugu nama di kaldera Gunung Bromo, Jawa Timur, oleh pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menuai protes. Tugu itu dianggap merusak lautan pasir yang merupakan kawasan konservasi alam. Keberadaannya juga dianggap merusak pemandangan lautan pasir yang merupakan objek wisata alam. Apa tanggapan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Kepala TNBTS John Kennedie menilai, protes dan kritik terkait pembangunan tugu nama itu adalah hal biasa. Menurut dia, wajar saja jika muncul perbedaan pandangan soal estetika. "Kalau dilihat dari sudut pandang estetika kan macam-macam. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek," katanya kepada Kompas.com, Sabtu (14/10/2017).

Tarik 4,6 Juta Wisatawan, Candi Borobudur Kelebihan Beban Pengunjung.

Hafiyyan - Bisnis.com 20 Agustus 2019

Bisnis.com, MAGELANG—Sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional, Candi Borobudur sudah kelebihan pengunjung. Oleh karena itu, pengembangan wisata alternatif di sekitar kawasan candi menjadi sangat penting. Direktur Pemasaran Pariwisata BOB Agus Rochiyardi menyampaikan, pengembangan area di sekitar Candi Borobudur kian penting, karena candi sebagai warisan dunia (world heritage) sudah kelebihan beban. Kapasitas maksimal pengunjung candi sebetulnya hanya 128 orang per hari atau 21.120 orang per tahun. Namun demikian, jumlah pengunjung Candi Borobudur membludak mencapai 4,6 juta orang per tahun, dengan komposisi wisatawan lokal 90% dan asing 10%.

B. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Pemangku Kepentingan Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan menyangkut kolaborasi kegiatan antar pemangku kepentingan *pentahelix* yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dunia usaha, Akademisi, dan Media. Masing-masing memiliki peran pokok sebagai berikut:

- Pemerintah lebih pada penetapan kebijakan publik antara lain dengan prinsip katalistik, pemberdayaan masyarakat, bergerak pada misi, dan berorientasi pada pasar (Osborne & Gaebler, 1973)⁵¹;
- Masyarakat memiliki hak dan kewajiban atas pelestarian sumber daya, dan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- Dunia usaha berperan dalam pengembangan industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat;
- Akademisi berperan dalam pengembangan riset dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi; dan
- Media berperan dalam promosi.

2. Pemetaan Pemangku Kepentingan Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan

Keberhasilan pariwisata edukasi dan kesukarelawan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kebijakan publik yang dibuat dapat mendukungnya. Pemerintah dalam hal ini memegang peran penting bagi keberhasilannya (Richter, 1989)⁵². Peta pemangku kegiatan lembaga publik adalah:

- Lingkaran dalam (*inner circle*) adalah kementerian/lembaga yang berpengaruh dan berperan langsung pada keberhasilan pariwisata edukasi dan kesukarelawan yaitu Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi;
- Lingkaran antara (*mid circle*) adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian

Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri; dan

- Lingkaran luar (*outer circle*) adalah kementerian pendukung terwujudnya perjalanan wisata yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

Fungsi-fungsi kementerian tersebut adalah:

- Bappenas: koordinasi antar lembaga, kebijakan utama pengembangan;
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: pedoman pengembangan edutourism, penetapan lokasi prioritas, penetapan target pasar wisatawan (wisman/wisnus);
- Kementerian Hukum dan HAM: keimigrasian;
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: program pendidikan, pedoman teknis pengelolaan sumber daya;
- Kementerian Riset dan Teknologi: peta jalan riset, pedoman riset;
- Kementerian Kesehatan: sanitasi dan CHSE;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: pedoman teknis pemanfaatan sumber daya;
- Kementerian Komunikasi dan informasi: penyiapan infrastruktur digital;
- Kementerian Koperasi dan UKM: pengembangan UMKM
- Kementerian Dalam Negeri: pengawasan pelaksanaan di lapangan bersama Pemerintah Daerah;
- Kementerian Perhubungan: aksesibilitas; dan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: infrastruktur jalan dan air bersih.

Pemangku kegiatan lain yang memerlukan perhatian adalah:

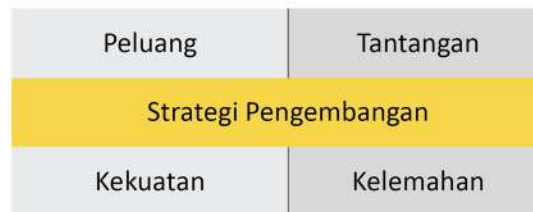
- Perguruan tinggi dan institusi pendidikan pada umumnya: meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dan mendorong pelajar/mahasiswa melakukan mobilitas akademik dan kegiatan lapangan;
- Industri pariwisata: menyiapkan paket wisata pariwisata edukasi dan sukarelawan, mempromosikan, dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan;
- Masyarakat: membekali kemampuan teknis dan pengetahuan, dan kesiapan menerima program; dan
- Media: mempromosikan melalui penulisan artikel dan laman dalam media sosial yang dimilikinya.

C. PELUANG DAN TANTANGAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN

Upaya pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pandangan terhadap faktor eksternal akan memengaruhi strategi pengembangan yang akan dilakukan dikaitkan dengan faktor internal yang ada. Dengan demikian strategi ditetapkan dengan terlebih dahulu memperhatikan perubahan dan tuntutan eksternal, baru kemudian diikuti dengan pemahaman akan sumber daya dan faktor internal.

Gambar 13.

Pendekatan Strategi Pengembangan Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan



Pandemi Covid-19 telah mengubah minat konsumen pada produk pariwisata yang lebih berkualitas untuk dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan sekaligus untuk menyalurkan semangat solidaritas sosial. Pariwisata edukasi dan kesukarelawan adalah produk yang sesuai dengan permintaan tersebut. Namun semakin kecilnya ceruk wisatawan ke depan menyebabkan tantangan semakin besar walaupun peluang tetap ada, terutama untuk meraih kembali pasar wisman.

Dengan memahami peluang dan tantangan maka dapat dilakukan evaluasi atas kelemahan dan kekuatan yang ada. Kekuatan Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam dan budaya yang terbuka luas bagi penelitian. Demikian pula dengan adanya perguruan tinggi dan industri pariwisata yang berkualitas. Namun kelemahan masih ada bila ingin bersaing dengan negara-negara lain, antara lain berupa tumpang tindih peraturan dan perbedaan persepsi dari para pelakunya.

1. Pariwisata Edukasi

a. Peluang dan Tantangan

Pandemi Covid-19 telah mengubah lansekap kepariwisataan global dan nasional. Beberapa peluang bagi pengembangan pariwisata edukasi pasca pandemi Covid-19 adalah:

- Permintaan pasar saat ini mengarah pada produk berbasis pengetahuan (*knowledge based tourism*) (Hermantoro, 2015)⁵³;
- Berkembangnya masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) terutama dari kalangan milenial;
- Keinginan untuk melakukan kegiatan studi sambil berwisata, atau sebaliknya, untuk memberikan pengalaman total yang lebih luas;
- Penciptaan lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat (*experience economy*);
- Membuka peluang kerja sama antar perguruan tinggi dan profesional (*knowledge economy*); dan
- Internasionalisasi institusi pendidikan mendorong mobilitas akademik bagi civitas academica (dosen dan mahasiswa/ siswa).

Di sisi lain, pandemi Covid-19 membuka banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pariwisata edukasi, yaitu:

- Ketatnya kompetisi global dan regional ketika banyak negara mulai mengembangkan pula jenis wisata ini;
- Perlindungan hak cipta;
- Kesiapan mitra/lembaga penjamin;
- Kualitas produk wisata yang disiapkan oleh mitra dan pelaku usaha pariwisata;
- Kesiapan pengaturan kunjungan (insentif/disinsentif);
- Koordinasi antar lembaga pemerintah Pusat dan anatra Pusat dengan Daerah;
- Koordinasi antara lembaga pemerintah dan swasta; dan
- Kesiapan masyarakat.

b. Kekuatan dan Kelemahan

Indonesia memiliki kekuatan besar dalam upaya pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan, antara lain berupa:

- Tersedianya lembaga mitra yang telah rutin melakukan kegiatan ini;
- Kekayaan sumber daya alam dan budaya yang membuka peluang untuk penelitian;
- Jumlah dan kualitas lembaga pendidikan yang aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membangun jejaring internasional;
- Kesiapan destinasi pariwisata; dan
- Dukungan pemerintah.

Namun perlu diakui pula masih adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya, yaitu:

- Kesiapan pengaturan kebijakan publik (koordinasi regulasi dan kelembagaan);
- Kesiapan mitra/lembaga penjamin (pemasaran);
- Kemampuan dan kualitas pelaku usaha pariwisata dalam berkompetisi global;
- Kesiapan masyarakat dalam menerima perbedaan budaya dan pengetahuan baru;
- Kesiapan lembaga penjamin/ perguruan tinggi terkait dengan isu dan mekanisme pelaksanaan;
- Kesiapan infrastruktur internet; dan
- Belum adanya prioritas jenis kegiatan dan destinasi yang ditawarkan.

2. Pariwisata Kesukarelawan

a. Peluang dan Tantangan

Peluang pariwisata kesukarelawan diperkirakan akan meningkat dengan pertimbangan pada:

- Berkembangnya kepedulian sosial masyarakat terhadap pelestarian dan memberi manfaat kepada orang lain (*empathic society*);

- Berkembangnya keinginan untuk berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*);
- Berkembangnya keinginan berwisata yang dapat lebih memberi makna bagi pengayaan kehidupan bagi diri sendiri dan masyarakat lain (*enlightment*);
- Berkembangnya minat pada produk yang belum banyak dikelola dan dikembangkan;
- Peningkatan kapasitas tuan rumah; dan
- Penciptaan lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain akan dijumpai beberapa tantangan yang perlu diperhitungkan, yaitu:

- Risiko sosial dan politik;
- Risiko bahwa masyarakat (*host communities*) menjadi tergantung pada program/ kegiatan kesukarelawan;
- Risiko bahwa kegiatan kesukarelawan menjadi dalih aktivitas kriminalitas, yang paling disoroti adalah kejahatan seksualitas dan *human trafficking* ;
- Kesiapan dan mekanisme seleksi, *briefing*, dan program penyiapan calon wisatawan edukasi dan kesukarelawan terutama yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut dalam jangka panjang;
- Kesiapan pelaksanaan;
- Kesiapan pelaku usaha dalam penyiapan produk;
- Kesiapan penerimaan masyarakat (*host communities*) terhadap pendatang dan kesiapan mentalitas dan sikap terhadap program kesukarelawan; dan
- Kesiapan pengawasan pelaksanaan.

b. Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan destinasi dalam pengembangan pariwisata kesukarelawan adalah:

- Kesiapan penerimaan (*hospitality*) dan kemampuan masyarakat untuk segera beradaptasi pada budaya pengunjung;
- Kesiapan infrastruktur dasar;
- Kesiapan elemen pendukung destinasi; dan
- Dukungan pemerintah.

Namun di sisi lain masih terdapat pula beberapa kelemahan dalam praktik di lapangan, yaitu:

- Penyiapan isu/program kesukarelawanan yang relevan bagi calon wisatawan kesukarelawanan/ organisasi kesukarelawanan;
- Kesiapan sebagian masyarakat dalam menerima kegiatan dan budaya baru (*culture shock*);
- Kemampuan pengawasan pelaksanaan di lapangan;
- Kesiapan produk wisata oleh mitra/lembaga penjamin; dan
- Belum adanya prioritas jenis kegiatan dan lokasi yang ditawarkan.

D. SEGMENTASI PASAR DAN PENETAPAN SASARAN PASAR PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN

Dalam pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawanan, segmentasi pasar dan penetapan pasar sasaran dapat dikembangkan sebagai berikut.

1. Pariwisata Edukasi

Dalam pariwisata edukasi, pasar bisa dibagi sesuai dengan spektrum pariwisata edukasi, seperti dipaparkan di bagian sebelumnya. Untuk pariwisata edukasi yang bersifat non-formal atau kasual, wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi bisa dikelompokkan berdasarkan karakteristik demografis (usia, latar belakang pendidikan, kelas sosial ekonomi, dll), karakteristik geografis (negara/daerah asal), dan keperilakuan (pengunjung pertama/*first-timer* atau pengunjung ulang/*repeater*). Untuk pariwisata edukasi yang bersifat non formal ini, pada dasarnya pembagian segmen wisatawan bisa dilakukan seperti halnya untuk wisatawan pada umumnya. Hanya saja, secara psikografis, wisatawan edukasi memiliki kesamaan sebagai wisatawan yang bertanggung jawab (*responsible tourists*).

Untuk kategori pariwisata edukasi yang lebih bersifat formal, pembagian segmen wisatawan bisa dilakukan berdasarkan durasi kunjungan dan jenis keterlibatan dalam wisata edukasi. Durasi kunjungan bisa mencapai 2 (dua) minggu untuk kursus Bahasa Indonesia atau mengikuti kegiatan KKN, sampai pada 12 (dua belas) bulan untuk melaksanakan kegiatan penelitian atau program pertukaran siswa.

Penetapan pasar sasaran untuk wisata edukasi bisa dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Mengutamakan pasar wisman pada negara dalam jangkauan jarak pendek (*short haul*) karena masih adanya faktor kecemasan akan kesehatan serta pertimbangan besarnya biaya perjalanan;
- b. Mengutamakan pasar wisnus untuk segera mengisi fasilitas yang *idle*;
- c. Mengembangkan pasar sasaran melalui pengembangan jejaring asosiasi antar institusi pendidikan dari tingkat pendidikan menengah sampai tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- d. Menyesuaikan pasar sasaran dengan kerja sama internasional yang dilakukan oleh institusi pendidikan di Indonesia, karena institusi pendidikan adalah pemangku kepentingan utama dalam pengembangan pariwisata edukasi di Indonesia.

Implikasi dari penetapan pasar sasaran ini adalah pengembangan strategi pengembangan pasar dan komunikasi pemasaran yang berbasis geografis (negara) sekaligus berbasis institusi dan asosiasi pendidikan. Pendekatan penetapan pasar sasaran terutama didasarkan pada identifikasi komunitas/institusi pendidikan yang kemudian bisa dianalisis silang dengan asal negara (pendekatan geografis).

2. Pariwisata Kesukarelawanan

Pasar kesukarelawanan juga bisa dibagi berdasarkan spektrum yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Untuk pariwisata kesukarelawanan yang *shallow*, wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi bisa dikelompokkan berdasarkan karakteristik demografis (usia, latar belakang pendidikan, kelas sosial ekonomi, dll), karakteristik geografis (negara/daerah asal), dan keperilakuan (pengunjung pertama/*first-timer* atau pengunjung ulang/*repeater*). Untuk pariwisata kesukarelawanan yang bersifat *shallow*, identifikasi segmen pasar bisa dilakukan seperti pada pasar wisatawan pada umumnya. Akan tetapi, secara psikografis, wisatawan edukasi memiliki kesamaan sebagai wisatawan yang bertanggungjawab (*responsible tourists*).

Dalam identifikasi pariwisata kesukarelawanan, kajian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa secara demografis, rata-rata usia wisatawan kesukarelawanan memiliki rentang usia yang cukup luas, yaitu antara 20-55 tahun dengan umur rata-rata adalah 35 tahun⁵⁵.

Karena pariwisata kesukarelawan (terutama yang bersifat mendalam/'*deep*') sangat bergantung pada komunitas atau kelompok masyarakat sebagai host (tuan rumah), maka penetapan sasaran pasar (*targeting*) harus menjadi komunitas (*communitization*). Pembangunan jejaring antar komunitas merupakan strategi pengembangan pasar yang lebih efektif untuk pariwisata kesukarelawanan.

Pengembangan komunikasi pemasaran juga perlu didasarkan pada komunitas, lebih berbentuk 'peer-to-peer', tidak satu arah (menjadi '*many-to-many*'), dan bertujuan untuk menguatkan jejaring antar komunitas.

IV

REKOMENDASI

A. OPSI SKENARIO PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANAN

1. Pengembangan Produk Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawan

- a. Menetapkan destinasi tujuan pariwisata edukasi dan kesukarelawan pada 5 (lima) destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan tema utama atas dasar keunikan sumber daya (*uniqueness*);
- b. Mendorong mitra (industri pariwisata, perguruan tinggi, LSM) untuk mulai mendorong tumbuhnya pariwisata edukasi dan kesukarelawan melalui penciptaan paket wisata berkualitas;
- c. Menyiapkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menerima dan mengembangkan program pariwisata edukasi dan kesukarelawan; dan
- d. Menyiapkan kelengkapan elemen destinasi.

2. Pengembangan Pemasaran

- a. Menetapkan target pasar;
- b. Mengembangkan strategi penempatan produk pariwisata edukasi dan kesukarelawan menggunakan platform yang tepat;
- c. Mengembangkan jejaring antarkomunitas sebagai dasar pengembangan pemasaran berbasis komunitas (*community-based marketing*);
- d. Mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif;

- e. Mengembangkan *brand* pemasaran edukasi dan pemasaran kesukarelawan sebagai salah satu produk wisata minat khusus (digital dan konvensional); dan
- f. Pengembangan promosi melalui media digital.

B. OPSI PEMBIAYAAN ATAU MODEL BISNIS PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWANANN

1. Opsi Pembiayaan

- a. Dana Pemerintah (APBN/D)
 - Pemanfaatan dana penelitian yang disediakan oleh pemerintah;
 - Promosi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga mitra di dalam dan luar negeri (pameran, pertemuan bisnis, pengembangan market place dsb);
 - Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku usaha pariwisata
 - Bantuan pengurusan sertifikasi kompetensi dan uaha pariwisata bagi UMKM; dan
 - Standarisasi dan sertifikasi produk penunjang utama.
- b. Dana Swasta/masyarakat
 - Pemanfaatan CSR untuk program kerja sama antara korporasi dengan wisatawan;
 - Pelibatan negara donor dan organisasi nirlaba; dan
 - Model B2B antara wisatawan dengan penyedia jasa.

2. Model Bisnis

- Model bisnis inklusif untuk pengembangan produk dan pemberdayaan masyarakat;
- Kemitraan antara industri pariwisata dengan lembaga pendidikan, LSM, dan lembaga donor; dan
- Kerja praktek (*recruitment*, magang) dari usaha swasta.

C. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWAN

1. Regulasi

Disamping diperlukannya evaluasi atas persoalan yang ada, rekomendasi regulasi diarahkan untuk mengefektifkan pelaksanaan beberapa kebijakan yang telah ada dan terkait dengan tujuan pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan. Beberapa diantaranya adalah gagasan Kampus Merdeka yang mendorong pelajar/mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus, PP no. 41 tahun 2006⁵⁶ tentang perizinan penelitian dan pengembangan lembaga asing, dan PerPres no. 64 tahun 2015⁵⁷ tentang koordinasi lintas sektor untuk pembangunan kepariwisataan.

a. Bidang Kepariwisataan

- Menetapkan rencana induk pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan;
- Memperkuat peran lembaga penelitian swasta atau perguruan tinggi berkenaan dengan pariwisata edukasi dan kesukarelawan;
- Memperkuat sistem koordinasi antar lembaga sejak dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- Menyiapkan insentif bagi mitra pelaku (industri pariwisata, perguruan tinggi, dan LSM) untuk menyiapkan paket kerja sama dan paket wisata;
- Menyiapkan kompetensi dan kualitas usaha pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan;
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menerima keberadaan program serta menjaga kelanjutannya; dan
- Mengembangkan metode penghitungan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan edukasi dan kesukarelawan dan penghitungan dampak ekonomi dari wisata edukasi dan kesukarelawan.

b. Bidang Kesehatan

- Mendorong dan mengawasi pelaksanaan CHSE;
- Bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan CHSE.

c. Bidang Keimigrasian

- Evaluasi terhadap jumlah dan jenis negara dengan fasilitas bebas visa;
- Perkuatan sistem pengawasan dan pencatatan terhadap wisman dengan tujuan edukasi dan kesukarelawan.
- Kemudahan pemberian izin tinggal (lama tinggal) bagi wisman dengan tujuan pariwisata edukasi dan kesukarelawan; dan
- Pengembangan e-visa yang diisi di negara asal wisman untuk kemudahan pengurusan dan pengawasan;

d. Bidang Riset dan Teknologi

- Menyiapkan peta jalan riset sesuai dengan fokus pada tujuan pembangunan nasional;
- Pedoman perijinan riset untuk wisman dan wisnus dan pemangku kegiatan (melengkapi perizinan riset lembaga asing);
- Pedoman pelaksanaan pelaku riset kelompok/individu;
- Insentif bagi peneliti yang meneliti pada fokus isu yang diperlukan dan di destinasi wisata prioritas; dan
- Pedoman dan persyaratan bagi mitra.

e. Bidang Pendidikan

- Mendorong pergerakan pelajar/mahasiswa untuk melakukan kegiatan studi dan kesukarelawan sekaligus wisata;
- Mendorong kerja sama antar lembaga pendidikan dalam dan luar negeri dan antar lembaga pendidikan di dalam negeri;
- Mendorong program penelitian dan pembinaan pelajar/mahasiswa pada destinasi dan isu prioritas nasional; dan
- Mendorong kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pelaku usaha pariwisata, LSM, dan lembaga nirlaba.

2. Kelembagaan

- Menjabarkan tugas dan fungsi kementerian dalam Keppres secara lebih detail;
- Menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan perbedaan tugas dan fungsi serta semangat kolaborasi;
- Struktur kementerian menganut paham “miskin struktur kaya fungsi” untuk menjamin fleksibilitas organisasi dalam menghadapi isu; dan
- Memperkuat ekosistem kelembagaan.

D. KERANGKA RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DAN KESUKARELAWAN

Peta jalan pengembangan pariwisata dan edukasi secara garis besar adalah sebagaimana berikut:

Gambar 14.
Peta Jalan



Tahap I (2021): Penyiapan pedoman dan arah pembangunan serta kolaborasi sektoral

Pada Tahap I ini disiapkan rencana induk yang dapat memberikan arah kegiatan bagi pelaksanaan program pariwisata edukasi dan kesukarelawan (Perpres). Disamping penyiapan pedoman bagi para pelaku, penyesuaian regulasi dan kelembagaan diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pelaksanaan. Demikian pula dilakukan pengembangan model bisnis yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Penyiapan kegiatan pada tahap awal ini perlu didukung pula oleh kegiatan studi teknis lain terkait dengan penetapan parameter yang diperlukan bagi evaluasi program termasuk penciptaan produk dan pemasaran dengan konsep pariwisata berkelanjutan dengan mengedepankan peran komunitas. Disarankan dilakukan pilihan beberapa destinasi sebagai “uji program”.

Tahap II (2022): Awal kegiatan pelaksanaan program

Pada Tahap II dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pemangku kegiatan. Kegiatan lain adalah mendorong inisiatif dan kreativitas penciptaan produk bagi para pelaku utama yaitu dari kalangan akademisi dan industri pariwisata.

Pemasaran dilakukan dengan mempertimbangkan target pasar wisatawan dan diutamakan pada pasar wisnus untuk dapat segera menghidupkan bisnis pariwisata di daerah. Pasar wisman dipilih atas dasar beberapa kriteria yang mempertimbangkan minat dan tidak terbatas pada basis negara dan kebangsaan lagi.

Tahap III (2003):Tindak lanjut pelaksanaan

Pada Tahap III dilakukan tindak lanjut pada kegiatan uji program pada destinasi yang dipilih. Tahap ini juga digunakan sebagai saat evaluasi awal yang akan digunakan sebagai dasar untuk memperluas pelaksanaan program pariwisata edukasi dan sukarelawan. Pada tahap ini diharapkan sudah terbentuk komitmen bersama antar pemangku kegiatan.

Tahap IV: Perluasan

Tahap IV merupakan evaluasi menyeluruh atas kegiatan program termasuk evaluasi atas kinerja unsur-unsur pelaksana publik dan privat. Bila pelaksanaan program selama 4 (empat) tahun berjalan dapat berjalan dengan baik, maka tahun-tahun selanjutnya program pariwisata edukasi dan sukarelawan diharapkan akan dapat dikembangkan oleh unsur-unsur yang terlibat didalamnya terutama dari akademi, industri pariwisata, LSM, dan organisasi nirlaba.

Tabel 2.

Kerangka Rencana Aksi

Rencana Aksi	Waktu				Keterangan
	2021	2022	2023	2024	
Penyiapan dasar perencanaan dan pengembangan					
Naskah awal akademik	x				Bappenas, selesai April
Rencana induk	x	x			Kememparekraf
Penyiapan pedoman teknis	x	x			Kementerian terkait
Penetapan destinasi percontohan	x				Kememparekraf, Daerah
Perencanaan tata ruang kegiatan pada destinasi percontohan		x			Kememparekraf, Bappenas KemenPUPR
Penetapan pola perjalanan lokal dan regional pada destinasi percontohan		x			Kememparekraf
Bimbingan dan pelatihan	x	x	x	x	Kememparekraf
Pengembangan produk					
Memperkuat peran mitra (lembaga pendidikan, perguruan tinggi, industri pariwisata, LSM, organisasi non profit)	x	x	x	x	Bappenas, Kememparekraf, Kemendiknas, Kemenristek
Pemberdayaan masyarakat (<i>local host development</i>)	x	x	x	x	Kememparekraf, KemenkopUKM, KemendesPDTtrans
Pengembangan infrastruktur dan elemen destinasi pariwisata	x	x	x	x	KemenPUPR, Kemenkominfo
Sertifikasi kompetensi dan usaha pariwisata	x	x	x	x	Kememparekraf, KemenkopUKM
Sertifikasi dan standarisasi UMKM dalam rantai nilai produk	x	x	x	x	KemenkopUKM
Menyiapkan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan program	x	x	x	x	Kememparekraf, Kemendagri
Pengembangan pasar					
Menetapkan target pasar wisman dan wismus	x	x	x	x	Kememparekraf
Memperkuat <i>market place</i> nasional sebagai kanal distribusi (<i>product placement</i>)	x	x	x	x	Kememparekraf, Kemenkop dan UKM, Kemenkominfo
Mengembangkan <i>brand</i> pariwisata edukasi dan kesukarelawanan	x	x	x	x	Kememparekraf, Kemenlu
Mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran	x	x		x	Kememparekraf

Regulasi					
Sinkronisasi regulasi antar K/L	x				KemenkoMarves, Bappenas
Rincian tugas dan fungsi K/L	x	x			Kemenpan
Dukungan riset untuk kebijakan publik terkait pariwisata edukasi dan kesukarelawanan	x	x	x	x	Kemenristek
Insentif bagi wisatawan pariwisata edukasi dan kesukarelawanan	x	x	x		Kemenparekraf, Kemenkumham
Insentif bagi mitra	x	x	x	x	Kemenkumham, Kemenristek
Menyiapkan model bisnis	x	x			Bappenas, Kemenkop, dan UKM
Kelembagaan					
Penjabaran tugas dan fungsi K/L terkait	x				Kemenpan
Menetapkan struktur organisasi K/L terkait isu	x				Kemenpan
Memperkuat ekosistem kelembagaan	x	x	x	x	Kemenkoinves, Bappenas

V

PENUTUP

Naskah akademik awal ini disiapkan bagi komunikasi awal antar kementerian/lembaga guna menyamakan persepsi dan wacana untuk kepentingan sinkronisasi program. Tindak lanjut berupa penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata edukasi dan kesukarelawan merupakan pedoman penting yang selanjutnya akan mendasari pelaksanaan program di lapangan. Penetapan rencana induk dalam bentuk Peraturan Presiden sangat disarankan karena akan mengikat kegiatan lintas K/L.

Kegiatan awal dapat segera dilakukan dengan melakukan pilihan destinasi sebagai percontohan pelaksanaan program. Evaluasi atas pelaksanaannya akan dapat memperkaya pedoman yang akan disusun selanjutnya. Hasilnya akan dapat menyempurnakan arah kebijakan selanjutnya dan menjadikan produk pariwisata edukasi dan kesukarelawan dapat secara nyata memberikan manfaat untuk segera membangkitkan pariwisata nasional dan memberikan kesempatan pada akademisi, industri, dan masyarakat untuk dapat terlibat secara penuh didalamnya.

Referensi

- Arifin, E. (2020). *Dampak Covid-19, PHRI: 200.000 Pegawai Restoran yang Bekerja di Mal di Rumah kan*. Dikutip dari <http://tribunnews.com>. 29 September 2020.
- Attaalla, F.A.H. (2020). Educational Tourism as a Tool to Increase the Competitiveness of Education in Egypt: A Critical Study. *International Journal of Tourism & Hospitality Review*. Vol 7, No.1, 2020. Hal. 58-65.
- Atlantis (2018). Dikutip dari <https://atlantisresearch.in/>. 4 Maret 2021.
- Benita (2020). Wawancara Rotary Semarang. 12 Maret 2021.
- BPS (2020a). *Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan)*. Dikutip dari <http://bps.go.id>.
- BPS (2020b). *Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara*. Dikutip dari <http://bps.go.id>.
- BPS (2020c). *Definisi Wisatawan*. Dikutip dari <http://www.bps.go.id>.
- Capetown Declaration (2002). Dikutip dari Goodwin, H (2014). What is Responsible Tourism? Dikutip dari <https://responsibletourismpartnership.org/what-is-responsible-tourism/>
- Custer, S. (2013). *Educational travel to grow dramatically by 2020*. Dikutip dari <http://thepienews.com/news/educational-travel-to-grow-dramatically-by-2020/>.
- Dcode (2020). Dcode EFC Analysis. Dikutip dari Choiriana, S. (2020). *Digital Innovation to Fight Covid-19*. PT Telekomunikasi Indonesia.
- Dewi, Ike Janita dan Ginting, Ginta (2021), *High-Value Experience, High-Value Market Segments, and Sustainability Principles in Quality Tourism: Case Studies on Tourism Villages in Yogyakarta*, working paper, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gibson, H. (1998). The Educational Tourist. *J.Phys.Educ.Recreat. Danc.* 1998, 69, 32-34. Dikutip dari Tomasi, S. et al (2020). *Educational Tourism and Local Development: The Role of Universities*. MDPI.
- Goabroad (2020). *Voluntourism: How it Will Benefits You & Your Host Country*. Dikutip dari <http://goabroad.com>. 4 Maret 2020.
- Hermantoro, H. (2014). *Creativity-Based Tourism: A Concept of Tourism Development Based on Indonesian Experience*, 2014. Saarbrücken: LAP.
- Huntington, S.P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University. Dalam Peters, B.G. (2000). *Institutional Theory: Problems and Prospects*. Wina: IHS.
- Kosar L, Kosar N. (2014). *Basic Aspects of Quality in Tourism and Hospitality*. QUAESTUS Multidisciplinary Research Journal, QUAESTUS No. 4, 2014, pp. 27-37. Dikutip dari: www.quaestus.ro/wp-content/uploads/2012/03/kosar4.pdf. 1 Maret 2021.

- Lyons, K.D. & Wearing, S. (2008). *Volunteer tourism as alternative tourism: Journey beyond otherness. Dalam Journal of Discovery in Volunteer Tourism*. Cambridge: CABI.
- Goabroad (2020). *Voluntourism: How it Will Benefits You & Your Host Country*. Dikutip dari <http://goabroad.com>. 4 Maret 2020.
- Maga, A.A. & Nicolau, P.E. (2018). *Conceptualizing Educational Tourism and the Educational Tourism Potential (Evidence from ASEAN Countries)*. Dikutip dari [researchgate.net](https://www.researchgate.net). 1 Maret 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang *Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing*.
- Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2015 tentang *Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan*.
- Pudjiadi, K. (2020). Dikutip dari Wardoyo, S. (2020). *Bertumbuhan, 2.000 Lebih Hotel Tutup karena Corona*. Dari <http://cnbcindonesia.com>. 4 Mei 2020.
- Hutabarat, E. (2020). Dikutip dari Yanwardhana, E. (2020). *95% Gulung Tikar, Pengusaha Agen Travel Sekarat!*. Dari <http://cnbcindonesia.com>. 30 Desember 2020.
- Israel, A. (1990). *Pengembangan Kelembagaan. Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta: LP3ES.
- Kosar L, Kosar N. (2014). Basic Aspects of Quality in Tourism and Hospitality. *QUAESTUS Multidisciplinary Research Journal*, QUAESTUS No. 4, 2014, pp. 27-37. Dikutip dari: www.quaestus.ro/wp-content/uploads/2012/03/kosar4.pdf. 1 Maret 2021.
- Kosiewicz, J. (nd). *Protreptikos-the Exhortation for Scientific Tourism*. Dikutip dari <http://www.content.sciendo.com> (tgl. 1 Maret 2021).
- Osborne, D.& Gaebler, T. (1973). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Penguin Group.
- Ritchie, B.W. et al (2003). *Managing Educational Tourism*, edisi pertama. Towanda, NY, USA: Multilingual Matters Ltd.
- Richter, L.K. (1989). *The Politics of Tourism in Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Save the Children Organization (2017). *The Truth about Voluntourism*. Dikutip dari <https://www.savethechildren.org.au/>. 7 Maret 2021.
- Save Travel Alliance (2021) Dikutip dari <http://www.save-travel.org>. 12 Februari 2021.
- Williams, S. (2009). *Tourism Geography. A New Synthesis*, edisi kedua. London: Routledge.
- Sharma, A. (2015). *Educational Tourism: Strategy for Sustainable Tourism Development with reference of Hadauti and Shekhawati Regions of Rajasthan, India*. Research Gate.

- Sie, L, et al (2016). *Towards an understanding of older adult educational tourism through the development of a three-phase integrated framework*. *Curr. Issues Tour*, 2016, 19, 100-136. Dikutip dari Tomasi.
- Tomasi, S. et al (2020). *Educational Tourism and Local Development: The Role of Universities*. MDPI.
- Simanungkalit, V. (2020). *UMKM sebagai Corong Pondasi Harapan Masyarakat di Era Pandemi*. Webinar Asparnas tgl. 4 November 2020.
- Sowards, W. (2018). *The Pros and Cons of Voluntourism*. Dikutip dari [http://www. passporthealthusa.com](http://www.passporthealthusa.com). 4 Maret 2021.
- Statista.com (2020). *Educational travel related international transactions in Canada from 2005 to 2019*. Dikutip dari <https://www.statista.com/statistics/477100/educational-travel-spending-by-canadians-in-other-countries/>
- Sungkari, H.S. (2020). Dikutip dari Mustika, S. (2020). *Jumlah Wisatawan Nusantara Menyusut 61%*. Dalam <https://travel.detik.com/travel-news/d-5292195/jumlah-wisatawan-nusantara-menyusut-61-persen>.
- Tomasi, S. et al (2020). *Educational Tourism and Local Development: The Role of Universities*. MDPI.
- UNWTO (nd). *Sustainable Development*. Dikutip dari <http://www.unwto.org> 17 Februari 2021.
- UNWTO (1999). *Global Code of Ethic for Tourism*. Madrid: UNWTO.
- UNWTO (2008). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*. Madrid: UNWTO.
- Williams, S (2009). *Tourism Geography: A New Synthesis*, edisi kedua. London: Routledge.
- Xosé, et al (2013). *Academic Tourism: A More Sustainable Tourism. Regional and Sectoral Economic Studies*. Vol. 13-2.hal 89-98.
- Yuswohady et al (2020). *Consumer Behavior new Normal after Covid-19: The 30 Predictions*. Jakarta: Inventure Knowledge.
- <http://voluntourismnews.wordpress.com> (diakses 1 Maret 2021).
- <http://volunteerworld.com> (diakses 1 Maret 2021).
- <https://center4girls.org/the-dangers-of-voluntourism><https://center4girls.org/the-dangers-of-voluntourism>; <https://www.worldvision.ca/stories/voluntourism-the-good-and-the-bad>, (diakses 2 Maret 2021).
- <https://www.worldvision.ca/stories/voluntourism-the-good-and-the-bad>; [https://www. volunteeringolutions.com/blog/voluntourism-will-continue-to-be-a-top-travel-trend/](https://www.volunteeringolutions.com/blog/voluntourism-will-continue-to-be-a-top-travel-trend/)), (diakses 2 Maret 2021).

Catatan Akhir

- 1 Simanungkalit, V. (2020). *UMKM sebagai Corong Pondasi Harapan Masyarakat di Era Pandemi*. Webinar Asparnas. 4 November 2020.
- 2 Dcode (2020). Dcode EFC Analysis. Dikutip dari Choiriana, S. (2020). *Digital Innovation to Fight Covid-19*. PT Telekomunikasi Indonesia.
- 3 BPS (2020a). *Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan)*. Dikutip dari <http://bps.go.id>.
- 4 BPS (2020b). *Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara*. Dikutip dari <http://bps.go.id>.
- 5 Sungkari, H.S. (2020). Dikutip dari Mustika, S. (2020). *Jumlah Wisatawan Nusantara Menyusut 61%*. Dalam <https://travel.detik.com/travel-news/d-5292195/jumlah-wisatawan-nusantara-menyusut-61-persen>.
- 6 Pudjiadi, K. (2020). Dikutip dari Wardoyo, S. (2020). *Bertumbuhan, 2.000 Lebih Hotel Tutup karena Corona*. Dari <http://cnbcindonesia.com>. 4 Mei 2020.
- 7 Arifin, E. (2020). *Dampak Covid-19, PHRI: 200.000 Pegawai Restoran yang Bekerja di Mal di Rumah kan*. Dikutip dari <http://tribunnews.com>. 29 September 2020.
- 8 Hutabarat, E. (2020). Dikutip dari Yanwardhana, E. (2020). *95% Gulung Tikar, Pengusaha Agen Travel Sekarat!*. Dari <http://cnbcindonesia.com>. 30 Desember 2020.
- 9 Yuswohady et al (2020). *Consumer Behavior new Normal after Covid-19: The 30 Predictions*. Jakarta: Inventure Knowledge.
- 10 De Mey, N. & De Ridder, P. (2020). *Shift in the Low Touch Economy*. Board of Innovation.
- 11 Yuswohady (2020). *The New Normal. 100 Prediction Life after Covid-19*. Jakarta: Inventure Knowledge.
- 12 UNWTO (nd). Sustainable Development. Dikutip dari <http://www.unwto.org>. 17 Februari 2021.
- 13 Capetown Declaration (2002). Dikutip dari Goodwin, H (2014). *What is Responsible Tourism?* Dikutip dari <https://responsibletourismpartnership.org/what-is-responsible-tourism/>
- 14 UNWTO (1999). *Global Code of Ethic for Tourism*. Madrid: UNWTO.
- 15 Kosar L, Kosar N. (2014). Basic Aspects of Quality in Tourism and Hospitality. *QUAESTUS Multidisciplinary Research Journal*, QUAESTUS No. 4, 2014, pp. 27-37. Dikutip dari: www.quaestus.ro/wp-content/uploads/2012/03/kosar4.pdf. 1 Maret 2021.
- 16 Williams, S (2009). *Tourism Geography: A New Synthesis*, edisi kedua. London: Routledge.

- 17 UNWTO (2008). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*. Madrid: UNWTO.
- 18 UNWTO (1999). *Global Code of Ethic for Tourism*. Madrid: UNWTO.
- 19 Kosar L, Kosar N. (2014). Basic Aspects of Quality in Tourism and Hospitality. *QUAESTUS Multidisciplinary Research Journal*, QUAESTUS No. 4, 2014, pp. 27-37. Dikutip dari: [www.quaestus.ro/wp-. content/uploads/2012/03/kosar4.pdf](http://www.quaestus.ro/wp-content/uploads/2012/03/kosar4.pdf). 1 Maret 2021.
- 20 Dewi, Ike Janita dan Ginting, Ginta (2021), *High-Value Experience, High-Value Market Segments, and Sustainability Principles in Quality Tourism: Case Studies on Tourism Villages in Yogyakarta*, working paper, Jakarta: Universitas Terbuka.
- 21 Williams, S. (2009). *Tourism Geography. A New Synthesis*. edisi kedua. London: Routledge.
- 22 UNWTO (2008). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*. Madrid: UNWTO.
- 23 BPS (2020c). Definisi Wisatawan. Dikutip dari <http://www.bps.go.id>.
- 24 Save Travel Alliance (2021) Dikutip dari <http://www.save-travel.org>. 12 Februari 2021.
- 25 Maga, A.A. & Nicolau, P.E. (2018). *Conceptualizing Educational Tourism and the Educational Tourism Potential (Evidence from ASEAN Countries)*. Dikutip dari researchgate.net. tgl. 1 Maret 2021.
- 26 Xosé, et al (2013). *Academic Tourism: A More Sustainable Tourism. Regional and Sectoral Economic Studies*. Vol. 13-2.hal 89-98.
- 27 Tomasi, S. et al (2020). *Educational Tourism and Local Development: The Role of Universities*. MDPI.
- 28 Gibson, H. (1998). The educational Tourist. *J.Phys.Educ.Recreat. Danc.* 1998, 69, 32-34. Dikutip dari Tomasi, S. et al (2020). *Educational Tourism and Local Development: The Role of Universities*. MDPI.
- 29 Sie, L, et al (2016). *Towards an understanding of older adult educational tourism through the development of a three-phase integrated framework*. *Curr. Issues Tour*, 2016, 19, 100-136. Dikutip dari Tomasi. Tomasi, S. et al (2020). *Educational Tourism and Local Development: The Role of Universities*. MDPI.
- 30 Ritchie, B.W. et al (2003). *Managing Educational Tourism*, edisi pertama. Towanda, NY, USA: Multilingual Matters Ltd.
- 31 Kosiewicz, J. (nd). *Protreptikos-the Exhortation for Scientific Tourism*. Dikutip dari <http://www.content.sciendo.com>. 1 Maret 2021.
- 32 Goabroad (2020). *Voluntourism: How it Will Benefits You & Your Host Country*. Dikutip dari <http://goabroad.com>. 4 Maret 2020.
- 33 Lyons, K.D. & Wearing, S. (2008). *Volunteer tourism as alternative tourism: Journey beyond otherness*. Dalam *Journal of Discovery in Volunteer Tourism*. Cambridge: CABI.
- 34 Goabroad (2020). *Voluntourism: How it Will Benefits You & Your Host Country*. Dikutip dari <http://goabroad.com> tgl 4 Maret 2020.

- 35 Benita (2020). Wawancara Rotary Semarang.
- 36 Tomasi, S. et al (2020). *Educational Tourism and Local Development: The Role of Universities*. MDPI.
- 37 Atlantis (2018). Dikutip dari <https://atlantisresearch.in/>. 4 Maret 2021.
- 38 Sharma, A. (2015). *Educational Tourism: Strategy for Sustainable Tourism Development with reference of Hadauti and Shekhawati Regions of Rajasthan, India*. Research Gate. Dengan penyesuaian.
- 39 Sowards, W. (2018). *The Pros and Cons of Voluntourism*. Dikutip dari
- 40 <http://www.passporthealthusa.com>. 4 Maret 2021.
- 41 Goabroad (2020). *Voluntourism: How it Will Benefits You & Your Host Country*. Dikutip dari <http://goabroad.com> tgl 4 Maret 2020.
- 42 Attaalla, F.A.H. (2020). *Educational Tourism as a Tool to Increase the Competitiveness of Education in Egypt: A Critical Study*. International Journal of Tourism & Hospitality Review. Vol 7, No.1, 2020. Hal. 58-65.
- 43 Custer, S. (2013). Educational travel to grow dramatically by 2020. Dikutip dari <http://thepienews.com/news/educational-travel-to-grow-dramatically-by-2020/>.
- 44 Statista.com (2020). Educational travel related international transactions in Canada from 2005 to 2019. Dikutip dari <https://www.statista.com/statistics/477100/educational-travel-spending-by-canadians-in-other-countries/>
- 45 Attaalla, F.A.H. (2020). *Educational Tourism as a Tool to Increase the Competitiveness of Education in Egypt: A Critical Study*. International Journal of Tourism & Hospitality Review. Vol 7, No.1, 2020. Hal. 58-65.
- 46 Save the Children Organization (2017). *The Truth about Voluntourism*. Dikutip dari <https://www.savethechildren.org.au/>. 7 Maret 2021.
- 47 Hermantoro, H. (2014). *Creativity-Based Tourism: A Concept of Tourism Development Based on Indonesian Experience, 2014*. Saarbrücken: LAP
- 48 <http://voluntourismnews.wordpress.com>, diakses 1 Maret 2021.
- 49 <http://volunteerworld.com>, diakses 1 Maret 2021.
- 50 Israel, A. (1990). Pengembangan Kelembagaan. *Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia*. Jakarta: LP3ES.
- 51 Huntingthon, S.P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University. Dalam Peters, B.G. (2000). *Institutional Theory: Problems and Prospects*. Wina: IHS.
- 52 Osborne, D.& Gaebler, T. (1973). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Penguin Group.
- 53 Richter, L.K. (1989). *The Politics of Tourism in Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- 54 Hermantoro, H. (2014). *Creativity-Based Tourism: A Concept of Tourism Development Based on Indonesian Experience, 2014*. Saarbrücken: LAP.

- 54 <https://center4girls.org/the-dangers-of-voluntourism><https://center4girls.org/the-dangers-of-voluntourism>; <https://www.worldvision.ca/stories/voluntourism-the-good-and-the-bad>, (diakses pada 2 Maret 2021).
- 55 <https://www.worldvision.ca/stories/voluntourism-the-good-and-the-bad>; <https://www.volunteeringsolutions.com/blog/voluntourism-will-continue-to-be-a-top-travel-trend/>; <https://www.volunteeringsolutions.com/blog/voluntourism-will-continue-to-be-a-top-travel-trend/>, (di akses pada 2 Maret 2021).
- 56 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang *Perizinan Melakukan penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing*
- 57 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2015 tentang *Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan*.

